

Mawardi, S.Th.I., M.A., dkk

MANAJEMEN LEMBAGA KEAGAMAAN

Editor:
Khairil Fazal, S.Th.I., M.Ag

Penerbit:
Fakultas Ushuluddin dan Filsafat
UIN AR-RANIRY

Bekerja sama dengan



PT. BAMBU KUNING UTAMA
2019

Sanksi Pelanggaran Pasal 72 Undang-undang Nomor 19 Tahun 2002 Tentang Hak Cipta

Barangsiapa dengan sengaja melanggar dan tanpa hak melakukan perbuatan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 2 Ayat (1) atau Pasal 49 Ayat (1) dan Ayat (2) dipidana dengan pidana penjara masing-masing paling singkat 1 (satu) bulan dan/atau denda paling sedikit Rp.1.000.000,00 (satu juta rupiah) atau pidana paling lama 7 (tujuh) tahun dan/atau denda paling banyak Rp.5.000.000.000,00 (lima miliar rupiah).

Barangsiapa dengan sengaja menyiarkan, memamerkan, mengedarkan, atau menjual kepada umum suatu ciptaan atau barang hasil pelanggaran hak cipta atau hak terkait sebagai dimaksud pada Ayat (1) dipidana dengan pidana penjara paling lama 5 (lima) tahun dan/atau denda paling banyak Rp.500.000.000,00 (lima ratus juta rupiah).

MANAJEMEN LEMBAGA KEAGAMAAN

| | |
|--------------|------------------------------|
| Penulis | Mawardi, S.Th.I., M.A., dkk |
| Editor | Khairil Fazal, S.Th.I., M.Ag |
| Layout | Zulpata,. M.Ag |
| Desain Cover | Ahmad Zaki |

Cetakan pertama, September 2019

ISBN : 978-623-91121-5-8

Hak Cipta dilindungi Undang-undang. Allright Reserved

Diterbitkan oleh:

Fakultas Ushuluddin dan Filsafat UIN Ar-Raniry

PT. Bambu Kuning Utama,

Mulia Banda Aceh

PENGANTAR TIM PENULIS

Syukur kehadiran Allah SWT yang telah memercikkan setetes dari keluasan lautan ilmu-Nya, sehingga penulisan buku Manajemen Lembaga Keagamaan ini dapat diselesaikan. Buku ini merupakan salah satu sarana ikhtiar membantu para mahasiswa dalam menempuh mata kuliah Manajemen Lembaga Keagamaan yang disusun berdasarkan silabi yang ada dan pengembangannya yang disesuaikan dengan pendidikan kekinian.

Pengembangan lembaga keagamaan memerlukan seni danilmutersendiri. Sehingga objek kajian manajemen lembaga keagamaan sangat penting dipelajari secara sistematis dan mendalam untuk selanjutnya diimplementasikan dalam aktivitas dan proses pendidikan, baik dalam lembaga pendidikan secara umum maupun lembaga lembaga pendidikan yang lainnya.

Pada kesempatan ini, kami ingin menyampaikan rasa terima kasih kepada penulis yang telah mempercayakan kepada kami untuk menerbitkan tulisannya dalam bentuk buku daras ini. Kemudian terima kasih yang tidak terhingga kepada bapak Drs. Fuadi, M.Hum, selaku Dekan Fakultas

Ushuluddin dan Filsafat UIN Ar-Raniry dan bapak Dr. Abd. Wahid, M.Ag selaku Wakil Dekan Bidang Akademik yang selalu mendorong kami untuk dapat menyelesaikan buku daras ini. Tanpa dorongan beliau tentu saja buku daras ini tidak akan pernah hadir ke tangan pembaca.

Akhirnya, kami berharap upaya ini menjadi dorongan positif bagi pengembangan serupa dalam topic yang berbeda. Sebagai langkah awal, kami menyadari bahwa dalam penyusunan buku daras ini masih terdapat berbagai kekurangan dan kami mengharapkan pembaca dapat memberikan masukan maupun saran untuk perbaikan penulisan buku daras di masa yang akan datang. Untuk itu, masukan konstruktif sangat dinantikan, semoga menjadi amal yang diridhai Allah Swt. Amiin.

Banda Aceh, 08 Agustus 2019

Tim Penulis

Daftar Isi

| | |
|---|-----|
| Pengantar Tim Penulis | v |
| Daftar Isi..... | vii |
| Konsep Dasar Manajemen Lembaga Keagamaan | 1 |
| <i>Mawardi, S.Th.I., M.A.</i> | |
| Ruang Lingkup Lembaga Keagamaan | 7 |
| <i>Musdawati, M.A.</i> | |
| Peran Lembaga Keagamaan dalam Membina Keumatan | 15 |
| <i>Dr. Juwaini, M.Ag</i> | |
| Optimalisasi Peran Tokoh Agama Dalam Meningkatkan Kesadaran Umat Beragama | 27 |
| <i>Dra. Suraiya iT, M.A., Ph.D</i> | |
| Agama Sebagai Perekat Sosial pada Masyarakat Multikultural | 53 |
| <i>Dr. Husna Amin, M.Hum</i> | |
| Dinamika Aliran Keagamaan | 68 |
| <i>Nurlaila, M.Ag & Hardiansyah, S.Th.I., M.Hum</i> | |
| Agama dan Organisasi Keagamaan..... | 83 |
| <i>Khairil Anwar, S.Ag</i> | |
| Daftar Pustaka..... | 104 |

KONSEP DASAR MANAJEMEN LEMBAGA KEAGAMAAN

Mawardi, S.Th.I., M.A.

A. Pendahuluan

Manusia merupakan makhluk yang unik yakni dapat sebagai makhluk individu maupun makhluk sosial. Dalam kehidupan bermasyarakat manusia pasti membutuhkan orang lain untuk memenuhi kebutuhannya. Kebutuhan yang dimaksud tidak hanya kebutuhan pokok seperti sandang, papan dan pangan.

Kebutuhan ini juga mencakup kebutuhan spiritual, dalam hal ini adalah agama. Suatu manusia yang telah memiliki agama, maka ia akan membentuk atau mengikuti lembaga keagamaan tertentu yang dianutnya. Ekspresi sosial dari ajaran serta kepercayaan agama dihidupkan dan dipelihara oleh adanya lembaga keagamaan. Tidak ada satu agamapun yang dapat hidup terus tanpa lembaga keagamaan.

Benar seseorang dapat menciptakan gagasan religius dan mengubah ritual yang kuno secara individual, tetapi ia dipengaruhi dan mempengaruhi yang lain melalui lembaga keagamaan. Keberadaan lembaga keagamaan kadang-kadang tidak disadari oleh para anggotanya, karena lahir

dan bereksistensi secara alamiah dengan simultan dengan kebutuhan masyarakat.

B. Manajemen Lembaga

1. Pengertian manajemen

Secara etimologi, manajemen (bahasa Inggris) berasal dari kata *to manage*, dalam Webster's New Collegiate Dictionary, kata *manage* dijelaskan berasal dari bahasa Itali "Managlo" dari kata "Managlare" yang selanjutnya kata ini berasal dari bahasa Latin *Manus* yang berarti tangan (Hand). Kata *manage* dalam kamus tersebut diberi arti: membimbing dan mengawasi, memperlakukan dengan seksama, mengurus perniagaan atau urusan-urusan, mencapai urusan tertentu.

Sedangkan secara terminologi, ada beberapa definisi mengenai manajemen, diantaranya yang dikemukakan oleh George R. Terry, manajemen adalah suatu proses atau kerangka kerja yang melibatkan bimbingan atau pengarahan suatu kelompok orang-orang kearah tujuan organisasi atau maksud yang nyata.

Menurut Malayu S. P. Hasibuan Manajemen adalah ilmu dan seni mengatur proses pemanfaatan sumber daya manusia dan sumber-sumber lainnya secara efektif dan efisien untuk mencapai suatu tujuan tertentu. Menurut Arifin Abdurrachman sebagaimana dikutip oleh M. Ngalim Purwanto, yang mengartikan manajemen merupakan kegiatankegiatan untuk mencapai sasaran-sasaran dan tujuan pokok yang telah ditentukan dengan menggunakan orang-orang pelaksana.

Jadi, dalam hal ini kegiatan dalam manajemen terutama adalah mengelola orang-orangnya sebagai pelaksana. Jadi manajemen adalah suatu proses yang dilakukan agar suatu usaha dapat berjalan dengan baik memerlukan perencanaan, pemikiran, pengarahan, dan pengaturan serta mempergunakan semua potensi yang ada baik personal maupun material secara efektif dan efisiensi.

2. Fungsi manajemen

Fungsi manajemen adalah rangkaian berbagai kegiatan yang telah ditetapkan dan memiliki hubungan saling ketergantungan antara yang satu dengan lainnya yang dilaksanakan oleh orang-orang dalam organisasi atau bagian-bagian yang diberi tugas untuk melaksanakan kegiatan. Fungsi manajemen beraneka ragam seperti perencanaan, pengorganisasian, pengkoordinasian, pengarahan, motivasi, komunikasi, kepemimpinan, penanggungans resiko, pengambilan keputusan dan pengawasan.

Dalam proses manajemen terlibat fungsi-fungsi pokok yang ditampilkan seorang manajer/pimpinan, yaitu: perencanaan (planning), pengorganisasian (organizing), penataan staff (staffing), memimpin (leading), memberikan motivasi (motivating), memberikan pengarahan (directing), memfasilitasi (fasilitating), memberdayakan staff (empowering) dan pengawasan (controlling).

Oleh karena itu, manajemen diartikan sebagai proses merencana, mengorganisasi, memimpin dan mengendalikan upaya organisasi dengan segala aspeknya agar tujuan

organisasi tercapai secara efektif dan efisien. Efektif berarti melakukan pekerjaan yang benar sesuai ketentuan (doing the right things), sedangkan efisien berarti melakukan pekerjaan dengan benar (doing thing right).

C. Pengertian Lembaga Keagamaan

Lembaga keagamaan berarti badan atau organisasi yang bertujuan mengembangkan dan membina kehidupan beragama. Lembaga keagamaan merupakan badan tempat mengembangkan dan membina kehidupan beragama. Lembaga keagamaan memiliki arti penting dalam membina dan mengernbangkan kehidupan beragama, meningkatkan keimanan dan ketakwaan. dan membina kerukunan hidup antar umat seagama dan antar umat yang berbeda agama.

Dengan adanya lembaga keagamaan, setiap kelompok penganut agama dan kepercayaan terhadap Tuhan Yang Maha Esa mempunyai wadah tempat pembinaan. Selain itu, jika terjadi sesuatu pertentangan atau konflik antar umat beragama. para aparat lembaga keagamaan melakukan dialog, kerja sama, dan musyawarah untuk mengatasinya, di bawah pengawasan dan pembinaan Departemen Agama.

Dengan demikian Lembaga keagamaan adalah lembaga mengatur kehidupan manusia. Hal ini sebagaimana yang diungkapkan oleh para ahli, salah satunya tokoh sosiologi Emile Durkheim yang menyatakan bahwa agama adalah suatu sistem kepercayaan dan tingkah laku yang berhubungan dengan hal-hal yang dianggap sakral dan dilarang.

Definisi lembaga agama ini tentu saja mempersatukan semua penganutnya menjadi satu komunitas moral berdasarkan nilai-nilai bersama dan lembaga Agama merupakan suatu lembaga yang sangat penting untuk mempersatu aspirasi manusia yang paling dominan dan berpengaruh besar dimana sejumlah besar moralitas, sumber tatanan masyarakat dan perdamaian batin individu terdapat di dalamnya sehingga dapat mewujudkan pribadi manusia yang beradab dalam menjalankan kewajiban sosialnya.

D. Konsep Lembaga Keagamaan

Masyarakat sederhana biasanya tidak memiliki lembaga agama secara terpisah. Kelompok agama juga dapat disebut sebagai komunitas. Fenomena keagamaan terjalin dalam berbagai kegiatan, mulai dari kehidupan keluarga sampai bidang-bidang social dan ekonomi. Dalam masyarakat-masyarakat yang kompleks lembaga keagamaan diperlukan demi terselenggaranya pertemuan, pengajaran, ritual dan untuk menjalin hubungan antar anggota secara internal maupun antar kelompok dalam masyarakat.

Lembaga keagamaan yang formal umumnya baru dijumpai pada masyarakat yang telah berkembang diferensiasi, spesialisasi dan stratifikasi sosialnya. Kehadiran lembaga keagamaan yang khusus seperti itu sebagai konsensi dan meningkatnya spesifikasi dan pembagaian kerja sebagai atribut masyarakat. Tipe hubungan antara diferensiasi agama dengan lembaga keagamaan (Ronald Roberston):

Tipe 1 adalah hubungan agama dengan masyarakat luas,

terdapat di bagian dunia industry. Agama secara lembaga terpisah dari kehidupan ekonomi, politik dan pendidikan. Pada masyarakat ini, pembagian kerja dan spesialisasi telah berkembang secara lanjut.

Tipe 2 adalah secara historis sering terdapat di kerajaan yang menganut agama negara, dan system birokratis sentral seperti Mesir yang mempunyai kecenderungan melaksanakan teokrasi secara ketat. Agama terorganisir pada tingkat pemerintahan difungsikan dalam kehidupan politik, ekonomi, pendidikan dan kegiatan lain.

Hal itu juga terdapat pada masyarakat Roma Katolik pada jaman modern seperti di daerah Portugal dan Spanyol. Demikian pula beberapa masyarakat muslim, memperlihatkan tipe ini. Masyarakat muslim umumnya cenderung diorganisir relative tidak memisahkan kegiatan agama dan non-agama.

Tipe 3, relative jarang, contohnya adalah kelompok pengikut sekte agama di Amerika Serikat yang terpisah dari suasana aktivitas yang terorganisir, hanya menyebarkan literature agama dan sewaktu-waktu berkumpul. *Tipe 4* terdapat di masyarakat primitif, dimana diantara kegiatan agama dan kegiatan lainnya erat hubungannya. Agama tidak terpisah dari kegiatan lainnya. Tetapi tidak ada lembaga keagamaan yang khusus, terpisah.

RUANG LINGKUP LEMBAGA KEAGAMAAN

Musdawati, M.A.

A. Pendahuluan

Lembaga keagamaan yang ada di Indonesia harus menjalankan fungsinya dengan benar dan adil, artinya sesuai dengan peraturan perundangan yang berlaku di Indonesia. Di Indonesia berdasarkan UU No. 1 tahun 1965 diakui lima agama yaitu Islam, Kristen Protestan, Kristen Katolik, Buddha; dan Hindu. Namun, pemerintah tidak membedakan perlakuan antara agama satu dengan agama lainnya. Yang lebih diutamakan ialah menjaga persatuan dan kesatuan bangsa, kerukunan, dan keberamaan dalam damai.

Kerukunan antar umat beragama harus selalu dijaga dan dibina dalam rangka mewujudkan cita-cita dan tujuan nasional sesuai dengan Pancasila dan UUD 1945. Semua pemeluk agama dan kepercayaan terhadap Tuhan Yang Maha Esa mempunyai hak yang sama dalam mengembangkan peningkatan kualitas keimanan dan ketakwaan. Oleh karena itu, umat beragama termasuk penganut kepercayaan harus saling menghormati dan bekerja sama.

B. Fungsi lembaga Keagamaan

Fungsi lembaga agama secara garis besarnya dibedakan menjadi dua, yaitu manifes (nyata) dan laten (tersembunyi):

1. Fungsi manifes lembaga keagamaan

Adapun fungsi manifes lembaga agama sebagai berikut:

a. Edukatif

Lembaga keagamaan mengajarkan dan membenikan pendidikan moral (berfungsi edukatif) bagi pemeluknya tentang hal-hal yang baik atau buruk sebagai pedoman tingkah laku pemeluknya. Ajaran agama memberikan penjelasan mengenai tindakan yang harus dilakukan dan dihindari oleh umat beragama.

b. Penyelamat

Melalui lembaga keagamaan setiap masyarakat memiliki keyakinan akan terselamatkan kehidupannya baik di dunia maupun pada kehidupan selanjutnya. Setiap manusia tidak terhindar dan berbagai masalah dalam kehidupannya sehingga agama dapat menjadi penyelamat manusia.

c. Pengawas sosial

Lembaga keagamaan berperan langsung untuk mewujudkan keteraturan sosial dalam kehidupan

bermasyarakat melalui larangan-larangan yang ada dalam kitab suci setiap agama. Dalam kitab suci dan ajaran agama terdapat sanksi yang kelak akan diterima apabila masyarakat melanggarnya.

d. Persaudaraan

Lembaga agama mampu mempertemukan kelompok atau golongan manusia yang heterogen dalam hal kebudayaan, ras, dan suku bangsa ke dalam suatu keluarga besar lembaga agama. Keterikatan persaudaraan terjalin ketika masyarakat merasakan adanya solidaritas dan kesatuan yang kuat karena adanya satu kepercayaan agama tertentu.

2. Fungsi laten lembaga Keagamaan

- a. Tingkat mikro, yaitu menggerakkan manusia untuk hidup dan memberi dorongan untuk semangat hidup.
- b. Tingkat makro, yaitu memenuhi kebutuhan masyarakat akan tegaknya dan kuatnya perasaan, ide-ide kolektif yang menjadi inti dan ciri persatuan.

C. Contoh Lembaga Keagamaan

Lembaga keagamaan menjadi salah satu jenis dari pada lembaga sosial yang dilakukan pengkajian tentang penuntasan permasalahan hukum-hukum masyarakat Indonesia, khususnya di bidang keyakinan. Baik Islam, Kristen, Katolik, Buddha, Hindu, ataupun Konghu Chu semuanya memiliki kelembagaan sendiri. Oleh karena itu setiap agama di Indonesia senantiasanya memiliki dewan agama ini,

sebagai akibat dari penyesuaian kebutuhan serta pengaturan pada perubahan sosial yang bersifat negative serta tidak baik bagi keteraturan sosial hidup masyarakat.

1. Islam

lembaga keagamaan dalam Islam sebagai Agama Masyoritas diyakini oleh masyarakat Indonesia memiliki, Majelis Ulama Indonesia atau disingkat dengan (MUI). Peranan MUI ini penting, selain memiliki fungsi memberikan jaminan halal/haram juga memberikan fatwa-fatwa yang berhubungan dengan dinamika kehidupan sosial.

2. Kristen

Lembaga agama lainnya yang mengatur tentang tata kelola hidup masyarakat, salah satu diantaranya adalah Persekutuan Gereja-gereje Indonesia yang lebih dikenal dengan (PGI). PGI ini sendiri memiliki peranan untuk mencitai dan mengasihi anak tuhan.

3. Katolik

Bentuk-bentuk lembaga keagamaan yang lainnya ialah khatolik, dengan lekat pada keyakinan ini adalah Konferensi Wali Gereja Indonesia yang kemudian disingkat menjadi (KWI). Peranan KWI ini selain berkerjasama untuk memberikan perlindungan atas pemeluknya.

4. Budha

Contoh lainnya yang berkaiatan dengan lembaga agama,

salah satunya ialah Agama Buddha dengan simbol lembaganya adalah Perwakilan Umat Buddha Indonesia yang disingkat menjadi (WALUBI). Fungsi lembaga ini selain memberikan regulasi juga memberikan fatwa-fatwa tentang keagamaan.

5. Hindu

Jenis lembaga agama selanjutnya yang ada dalam Agama Hidup adalah Parisada Hindu Dharma Indonesia atau yang lebih dikenal dengan (PHDI). Lembaga ini memberikan pengulasan tentang berbagai masalah sosial di Indonesia serta memberikan perlindungan bagi seluruh WNI yang beragama Hindu.

6. Khonghucu

Khonghucu merupakan agama termuda di Indonesia yang telah diakui secara legalitasnya oleh Presiden K.H. Abdurrahman Wahid, sebagai salah satu keyakinan, ia memiliki lembaga agama dengan nama Majelis Tinggi Agama Khonghucu Indonesia (MATAKIN). Dengan penyebaran pemeluknya hampir ada disebagaian besar Provinsi-Provinsi di Indonesia itu sendiri. Adapun secara umum, contoh-contoh lainnya mengenai lembaga agama ini yang ada dalam kehidupan masyarakat, antara lain;

a. KUA (Kantor Urusan Agama) yang berfungsi untuk memberikan regulasi oengaduan KDART ataupun Pernikahan.

b. Depag (Departemen Agama), menjadi salah satu contoh lembaga agama yang memberikan kontribusi pada peranan pendidikan-pendidikan secara

menyeluruh kepada masyarakat.

c. Kementerian Agama (Kemenag), menjadi salah satu jenis lembaga agama yang diakui sebagai peranan tertinggi masyarakat dengan upaya memberikan hubungan kepada lembaga legislatif yaitu presiden.

d. Pengadilan Agama, merupakan salah satu bentuk lembaga agama yang memberikan regulasi tindakan-tindakan menyimpang dengan norma atau hukum yang berlaku di dalam masyarakat.

Dari serangkaian penjelasan tentang contoh lembaga agama diatas, secara umum dapatlah dikatakan bahwasanya peranan mampu memberikan edukasi, rasa persaudaraan, perlindungan, pengawas sosial dan juga penyelamat bagi penganutnya. Dengan demikianlah segala aspek dalam lembaga keagamaan diperlukan. Lembaga keagamaan mewujudkan kerukunan hidup antara umat beragama. Lembaga keagamaan tidak untuk dipertentangkan satu sama lain, tetapi untuk membina kerukunan, persatuan, dan keutuhan bangsa Indonesia demi kepentingan masyarakat yang lebih luas. Pada tanggal 30 November 1967, diadakan musyawarah antarumat beragama. Musyawarah itu menghasilkan tiga keputusan penting, antara lain:

1) Meningkatkan pembinaan kerukunan hidup di antara sesama umat beragama melalui lembaga-lembaga/ organisasi keagamaan (MUI, DGI, KWI, PHDP, dan WALUBI).

2) Untuk meningkatkan pembinaan kerukunan hidup di

antara sesama umat beragama diperlukan suatu wadah musyawarah, suatu forum konsultasi dan komunikasi antara pimpinan agama di Indonesia.

3) wadah musyawarah dan forum konsultasi dan komunikasi ini dihadiri oleh wakil-wakil majelis agama dan wakil pemerintah.

D. Unsur - unsur dan ciri-ciri lembaga keagamaan,

Menurut Light, Keller dan Callhoun (1989) unsure-unsur agama adalah sebagai berikut:

a. Kepercayaan adalah suatu prinsip yang dianggap benar dan tanpa ada keraguan lagi. Setiap kepercayaan monotheisme yang percaya bahwa tuhan itu satu atau percaya pada reinkarnasi bagi umat agama-agama Timur, seperti Hindu dan Budha.

b. Praktik keagamaan, seperti berdoa, bersembahyang, puasa dan sedekah.

c. Praktik keagamaan berbeda dengan ritual keagamaan karena ritual keagamaan menyangkut hubungan manusia dengan tuhan secara vertical. Praktik keagamaan meliputi hubungan horizontal yaitu hubungan antar manusia sesuai dengan ajaran agama.

d. Simbol keagamaan dapat member tanda atau identitas agama yang dianut umatnya. Misalnya, model atau corak pakaian orang Islam dan bentuk bangunan

rumah ibadah umat Hindu (Pura dan candi).

e. Umat adalah penganut masing-masing agama. Sekarang ini banyak wadah atau lembaga yang menampung umat beragama dalam rangka melaksanakan praktik agamanya, seperti KWI, Majelis Taklim, Paroki dan PGI.

f. Pengalaman keagamaan. Pengalaman keagamaan setiap umat berbeda karena menyangkut masalah yang sulit dibuktikan dan diukur kadarnya. Pengalaman keagamaan bersifat individual. Seperti pengalaman spiritual tentang orang yang sakit parah yang oleh dokter sudah divonis meninggal, tetapi karena doa dari yang sakit maupun keluarganya orang yang sakit dapat sembuh kembali.

Unsur-unsur lembaga keagamaan tersebut merupakan elemen yang dimiliki setiap agama. Hanya corak dan perwujudannya saja yang berbeda. Sedangkan ciri-ciri lembaga keagamaan antara lain, adalah:

1. Merupakan sistem keyakinan.
2. Merupakan perwujudan sesuatu yang diyakini sebagai hal gaib.
3. Menjadi pendorong, penggerak, dan pengendali perilaku.
4. Mempersatukan umat.
5. Bertujuan memuliakan umatnya.

PERAN LEMBAGA KEAGAMAAN DALAM MEMBINA KEUMATAN

Dr. Juwaini, M.Ag

A. Pendahuluan

Bangsa Indonesia dengan masyarakat yang multikultural, bermacam-macam budaya, suku, bahasa dan agama, menjadikan bangsa ini sangat unik dimata dunia. Namun keunikan itu membawa dampak positif dan negatif. Untuk meminimalisirkan dampak negatif itu, terutama dalam bidang keagamaan, bidang yang sangat sensitif dan jika tidak diorganisir kan tibul gejolak-gejolak perselihan yang mnghancurkan rasa persatuan. Maka dibentuklah lembaga keagamaan yang bertujuan untuk membuka mata umat beragama bahwa Indonesia bukanlah hanya memiliki satu agama namun beberapa agama yang saling menghormati dan menghargai satu dengan yang lainnya. Lembaga atau organisasi yang timbul dari setiap agama kiranya dapat juga menimbulkan rasa perdamaian dan persatuan sebagai cita-cita satu bangsa yang sama-sama mencari kebahagiaan dibiuni dan akhirat/kehidupan berikutnya.

Lembaga keagamaan merupakan sekelompok orang yang memiliki kesamaan dalam menganut agama dan

kepercayaannya serta melakukan aktivitas-aktivitas yang menunjang tercapainya tujuan dari lembaga tersebut. Ekspresi sosial dari ajaran agama dihidupkan dan dipelihara oleh adanya masyarakat penganut yang disebut dengan lembaga keagamaan, baik yang jelas strukturnya maupun sifatnya samar- samar. Pada saat yang bersamaan, dalam rangka mempertahankan keberadaannya, setiap lembaga keagamaan pun akan membangun jaringan sosialnya melalui pengembangan kelembagaan atau kegiatan kemasyarakatan.

Munculnya lembaga keagamaan adalah dalam rangka atau untuk mengakomodasi dan mewadahi terdapatnya keaneka ragaman corak berpikir, kepentingan, orientasi, dan tujuan para penganut agama itu sendiri.

B. Peran Lembaga Keagamaan

Demi terwujudnya kerukunan umat beragama, setiap organisasi keagamaan dituntut untuk menumbuhkan jiwa-jiwa yang berakhlak baik, berbudi pekerti, beriman, dan menciptakan manusia yang bertingkah laku baik sesuai ajaran dan kepercayaan yang dianut oleh tiap masing-masing umat yang beragama. Dalam hal ini adalah untuk mewujudkan kedamaian dan kerukunan antar umat beragama. Karena dengan adanya kedamaian maka seluruh unsur-unsur kebaikan dalam setiap ajaran agama dapat direalisasikan tanpa adanya konflik atau perselisihan yang menghancurkan rasa persatuan dalam berbangsa dan setanah air.

C. Peran Pemerintah Dalam Membina Kerukunan

Setelah proklamasi kemerdekaan Indonesia dikumandangkan, pemerintah pada tanggal 3 Januari 1946 menetapkan berdirinya Departemen Agama RI dengan tugas pokok, yaitu menyelenggarakan sebagian dari tugas umum pemerintah dan pembangunan dalam bidang agama. Penyelenggaraan tugas pokok Departemen Agama itu, di antara lain berbentuk bimbingan, pembinaan dan pelayanan terhadap kehidupan beragama, sama sekali tidak mencampuri masalah aqidah dan kehidupan intern masing-masing agama dan pemeluknya. Namun, pemerintah perlu mengatur kehidupan ekstern mereka, yaitu dalam hubungan kenegaraan dan kehidupan antar pemeluk agama yang berada dalam wilayah Negara Kesatuan Republik Indonesia.

Pada buku Pedoman Dasar Kehidupan Beragama tahun 1985-1986 Bab IV halaman 49 disebutkan hal-hal sebagai berikut:

1. Kerukunan hidup beragama adalah proses yang dinamis yang berlangsung sejalan dengan pertumbuhan masyarakat itu sendiri.
2. Pembinaan kerukunan hidup beragama adalah upaya yang dilaksanakan secara sadar, berencana, terarah, teratur, dan bertanggung jawab untuk meningkatkan kerukunan hidup beragama dengan:
3. Menanamkan pengertian akan nilai kehidupan bermasyarakat yang mampu mendukung kerukunan hidup beragama.

a. Mengusahakan lingkungan dan keadaan yang mampu menunjang sikap dan tingkahlaku yang mengarah kepadakerukunan hidup beragama.

b. Menumbuhkan dan mengembangkan sikap dan tingkah laku yang mewujudkan kerukunan hidup beragama.

1. Kondisi umat beragama di Indonesia. Pelaksanaan pembinaan kerukunan hidup beragama dimaksudkan agar umat beragama mampu menjadi subjek pembangunan yang bertanggung jawab, khususnya pembinaan kerukunan hidup beragama.

Umat beragama Indonesia mempunyai kondisi yang positif untuk terus dikembangkan, yaitu:

a. Ketaqwaan terhadap Tuhan Yang Maha Esa.

b. Kepercayaan kepada kehidupan di hari kemudian.

c. Memandang sesuatu selalu melihat dua aspek, yaitu aspek dunia dan akhirat.

4. Kesiediaan untuk hidup sederhana dan berkorban.

5. Senantiasa memegang teguh pendirian yang berkaitan dengan aqidah agama.

D. Langkah-langkah Yang Dilakukan Agar Negara Damai, Rukun Antar Umat Beragama

1. Memperkuat dasar-dasar kerukunan internal dan antar umat beragama, serta antar umat beragama

dengan pemerintah.

2. Membangun harmoni sosial dan persatuan nasional dalam bentuk upaya mendorong dan mengarahkan seluruh umat beragama untuk hidup rukun dalam bingkai teologi dan implementasi dalam menciptakan kebersamaan dan sikap toleransi.

3. Menciptakan suasana kehidupan beragama yang kondusif dalam rangka memantapkan pendalaman dan penghayatan agama serta pengamalan agama yang mendukung bagi pembinaan kerukunan hidup intern dan antar umat beragama.

4. Melakukan eksplorasi secara luas tentang pentingnya nilai-nilai kemanusiaan dari seluruh keyakinan plural umat manusia yang fungsinya dijadikan sebagai pedoman bersama dalam melaksanakan prinsip-prinsip berpolitik dan berinteraksi sosial satu sama lainnya dengan memperlihatkan adanya sikap keteladanan.

5. Melakukan pendalaman nilai-nilai spiritual yang implementatif bagi kemanusiaan yang mengarahkan kepada nilai-nilai Ketuhanan, agar tidak terjadi penyimpangan-penyimpangan nilai-nilai sosial kemasyarakatan maupun sosial keagamaan.

5. Menempatkan cinta dan kasih dalam kehidupan umat beragama dengan cara menghilangkan rasa saling curiga terhadap pemeluk agama lain, sehingga akan tercipta suasana kerukunan yang manusiawi tanpa dipengaruhi oleh faktor-faktor tertentu.

6. Menyadari bahwa perbedaan adalah suatu realita dalam kehidupan bermasyarakat, oleh sebab itu

hendaknya hal ini dijadikan mozaik yang dapat memperlindah fenomena kehidupan beragama.

7. Para pembina formal termasuk aparatur pemerintah dan para pembina non formal yakni tokoh agama dan tokoh masyarakat merupakan komponen penting dalam pembinaan kerukunan antar umat beragama.

8. Masyarakat umat beragama di Indonesia yang sangat heterogen perlu ditingkatkan sikap mental dan pemahaman terhadap ajaran agama serta tingkat kedewasaan berfikir agar tidak menjurus ke sikap primordial.

9. Peraturan pelaksanaan yang mengatur kerukunan hidup umat beragama perlu dijabarkan dan disosialisasikan agar bisa dimengerti oleh seluruh lapisan masyarakat, dengan demikian diharapkan tidak terjadi kesalahpahaman dalam penerapan baik oleh aparat maupun oleh masyarakat, akibat adanya kurang informasi atau saling pengertian diantara sesama umat beragama.

10. Perlu adanya pemantapan fungsi terhadap wadah-wadah musyawarah antar umat beragama untuk menjembatani kerukunan antar umat beragama.

E. Hambatan Dalam Menciptakan Kerukunan Umat Beragama

1. Semakin meningkat kecenderungan umat beragama untuk mengejar jumlah (kuantitas) pemeluk agama dalam menyebarkan agama dari pada mengejar kualitas umat beragama.

2. Kondisi sosial budaya masyarakat yang membawa umat mudah melakukan otak-atik terhadap apa yang ia terima, sehingga kerukunan dapat tercipta tetapi agama itu kehilangan arti, fungsi maupun maknanya.
3. Keinginan mendirikan rumah ibadah tanpa memperhatikan jumlah pemeluk agama setempat sehingga menyinggung perasaan umat beragama yang memang mayoritas di tempat itu.
4. Menggunakan mayoritas sebagai sarana penyelesaian sehingga akan menimbulkan masalah. Misalnya, pemilikan dana dan fasilitas pendidikan untuk memaksakan kehendaknya pada murid yang belajar.
5. Makin bergesarnya pola hidup berdasarkan kekeluargaan atau gotong royong ke arah kehidupan individualistis.

Dari berbagai kondisi yang mendukung kerukunan hidup beragama maupun hambatan hambatan yang ada, agar kerukunan umat beragama dapat terpelihara maka pemerintah dengan kebijaksanaannya memberikan pembinaan yang intinya bahwa masalah kebebasan beragama tidak membenarkan orang yang beragama dijadikan sasaran dakwah dari agama lain, pendirian rumah ibadah, hubungan dakwah dengan politik, dakwah dan kuliah subuh, batuan luar negeri kepada lembaga-lembaga keagamaan di Indonesia, peringatan hari-hari besar agama, penggunaan tanah kuburan, pendidikan agama dan perkawinan campuran.

Jika kerukunan intern, antar umat beragama,

dan antara umat beragama dengan pemerintah dapat direalisasikan dalam kehidupan bermasyarakat dan bernegara secara harmonis, niscaya perhatian dan konsentrasi pemerintah membangun Indonesia menuju masyarakat adil dan makmur yang diridhai Allah SWT akan segera terwujud, berkat dukunag umat beragama yang mampu hidup berdampingan dengan serasi. Sekaligus merupakan contoh kongkret kerukunan hidup beragama bagi masyarakat dunia.

F. Solusi Masalah Kerukunan Antar Umat Beragama

1. Dialog antar pemeluk agama

Sejarah perjumpaan agama-agama yang menggunakan kerangka politik secara tipikal hampir keseluruhannya dipenuhi pergumulan, konflik dan pertarungan. Karena itulah dalam perkembangan ilmu sejarah dalam beberapa dasawarsa terakhir, sejarah yang berpusat pada politik yang kemudian disebut sebagai “sejarah konvensional” dikembangkan dengan mencakup bidang-bidang kehidupan sosial-budaya lainnya, sehingga memunculkan apa yang disebut sebagai “sejarah baru” (new history). Sejarah model mutakhir ini lazim disebut sebagai “sejarah sosial” (social history) sebagai bandingan dari “sejarah politik” (political history).

Penerapan sejarah sosial dalam perjumpaan Kristen dan Islam di Indonesia akan sangat relevan, karena ia akan dapat mengungkapkan sisi-sisi lain hubungan

para penganut kedua agama ini di luar bidang politik, yang sangat boleh jadi berlangsung dalam saling pengertian dan kedamaian, yang pada gilirannya mewujudkan kehidupan bersama secara damai (peaceful co-existence) di antara para pemeluk agama yang berbeda.

Hampir bisa dipastikan, perjumpaan Kristen dan Islam (dan juga agama-agama lain) akan terus meningkat di masa-masa datang. Sejalan dengan peningkatan globalisasi, revolusi teknologi komunikasi dan transportasi, kita akan menyaksikan gelombang perjumpaan agama-agama dalam skala intensitas yang tidak pernah terjadi sebelumnya.

Dengan begitu, hampir tidak ada lagi suatu komunitas umat beragama yang bisa hidup eksklusif, terpisah dari lingkungan komunitas umat-umat beragama lainnya. Satu contoh kasus dapat diambil: seperti dengan meyakinkan dibuktikan Eck (2002), Amerika Serikat, yang mungkin oleh sebagian orang dipandang sebagai sebuah “negara Kristen,” telah berubah menjadi negara yang secara keagamaan paling beragam. Saya kira, Indonesia, dalam batas tertentu, juga mengalami kecenderungan yang sama. Dalam pandangan saya, sebagian besar perjumpaan di antara agama-agama itu, khususnya agama yang mengalami konflik, bersifat damai.

Dalam waktu-waktu tertentu ketika terjadi perubahan-perubahan politik dan sosial yang cepat, yang memunculkan krisis pertikaian dan konflik sangat boleh jadi meningkat intensitasnya. Tetapi hal ini seyogyanya tidak mengaburkan perspektif kita, bahwa kedamaian lebih sering menjadi feature utama. Kedamaian dalam perjumpaan itu, hemat saya, banyak

bersumber dari pertukaran (exchanges) dalam lapangan sosio-kultural atau bidang-bidang yang secara longgar dapat disebut sebagai “non-agama.”

Bahkan terjadi juga pertukaran yang semakin intensif menyangkut gagasan-gagasan keagamaan melalui dialog-dialog antaragama dan kemanusiaan baik pada tingkat domestik di Indonesia maupun pada tingkat internasional; ini jelas memperkuat perjumpaan secara damai tersebut. Melalui berbagai pertukaran semacam ini terjadi penguatan saling pengertian dan, pada gilirannya, kehidupan berdampingan secara damai.

2. Bersikap optimis

Walaupun berbagai hambatan menghadang jalan kita untuk menuju sikap terbuka, saling pengertian dan saling menghargai antaragama, saya kira kita tidak perlu bersikap pesimis. Sebaliknya, kita perlu dan seharusnya mengembangkan optimisme dalam menghadapi dan menyongsong masa depan dialog. Paling tidak ada tiga hal yang dapat membuat kita bersikap optimis.

Pertama, pada beberapa dekade terakhir ini studi agama-agama, termasuk juga dialog antaragama, semakin merebak dan berkembang di berbagai universitas, baik di dalam maupun di luar negeri. Selain di berbagai perguruan tinggi agama, IAIN dan Seminari misalnya, di universitas umum seperti Universitas Gajah Mada, juga telah didirikan Pusat Studi Agama-agama dan Lintas Budaya. Meskipun baru seumur jagung.

Hal itu bisa menjadi pertanda dan sekaligus harapan bagi pengembangan paham keagamaan yang lebih toleran dan pada akhirnya lebih manusiawi. Juga bermunculan lembaga- lembaga kajian agama, seperti Interfidei dan FKBA di Yogyakarta, yang memberikan sumbangan dalam menumbuhkembangkan paham pluralisme agama dan kerukunan antarpenganutnya.

Kedua, para pemimpin masing-masing agama semakin sadar akan perlunya perspektif baru dalam melihat hubungan antar-agama. Mereka seringkali mengadakan pertemuan, baik secara reguler maupun insidental untuk menjalin hubungan yang lebih erat dan memecahkan berbagai problem keagamaan yang tengah dihadapi bangsa kita dewasa ini.

Kesadaran semacam ini seharusnya tidak hanya dimiliki oleh para pemimpin agama, tetapi juga oleh para penganut agama sampai ke akar rumput sehingga tidak terjadi jurang pemisah antara pemimpin agama dan umat atau jemaatnya. Kita seringkali prihatin melihat orang-orang awam yang pemahaman keagamaannya bahkan bertentangan dengan ajaran agamanya sendiri. Inilah kesalahan kita bersama. Kita lebih mementingkan bangunan-bangunan fisik peribadatan dan menambah kuantitas pengikut, tetapi kurang menekankan kedalaman (intensity) keberagamaan serta kualitas mereka dalam memahami dan mengamalkan ajaran agama.

Ketiga, masyarakat kita sebenarnya semakin dewasa dalam menanggapi isu- isu atau provokasi-provokasi. Mereka tidak lagi mudah disulut dan diadu-domba serta dimanfaatkan,

baik oleh pribadi maupun kelompok demi target dan tujuan politik tertentu. Meskipun berkali-kali masjid dan gereja diledakkan, tetapi semakin teruji bahwa masyarakat kita sudah bisa membedakan mana wilayah agama dan mana wilayah politik.

Ini merupakan ujian bagi agama autentik (authentic religion) dan penganutnya. Adalah tugas kita bersama, yakni pemerintah, para pemimpin agama, dan masyarakat untuk mengingatkan para aktor politik di negeri kita untuk tidak memakai agama sebagai instrumen politik dan tidak lagi menebar teror untuk mengadu domba antarpenganut agama.

Jika tiga hal ini bisa dikembangkan dan kemudian diwariskan kepada generasi selanjutnya, maka setidaknya kita para pemeluk agama masih mempunyai harapan untuk dapat berkomunikasi dengan baik dan pada gilirannya bisa hidup berdampingan lebih sebagai kawan dan mitra daripada sebagai lawan.

OPTIMALISASI PERAN TOKOH AGAMA DALAM MENINGKATKAN KESADARAN UMAT BERAGAMA

Dra. Suraiya iT, M.A., Ph.D

A. Pendahuluan

Dalam kondisi umat beragama yang tengah terjadi saat ini, peran tokoh agama harus mampu menanamkan nilai-nilai keagamaan dalam upaya mencapai kesejahteraan keluarga dan masyarakat. Bersamaan dengan itu pula saran, tindak lanjut terhadap pemerintah maupun lembaga keagamaan yang berwenang dari para tokoh agama ini sangat diperlukan.

Pelibatan tokoh agama ini karena tokoh agama secara esensial memiliki dua fungsi keagamaan yang cukup sentral yaitu fungsi pemeliharaan dan pengembangan ajaran Agama. Fungsi pemeliharaan maksudnya adalah tokoh agama memiliki hak dan wewenang untuk memimpin ritual keagamaannya. Karena fungsi pemeliharaan inilah maka tokoh agama akan selalu mengajarkan kepada pengikutnya untuk melakukan ritual agama secara benar dan berperilaku sesuai dengan ajarannya.

Sedangkan dengan fungsi pengembangan ajaran tokoh agama akan berupaya melakukan misi dakwah untuk

menyiarkan agama dalam rangka meningkatkan kualitas dan kuantitas pemeluknya. Melalui fungsi ini setiap agama memungkinkan untuk dapat hidup dan berkembang.

Tokoh agama harus bisa memberdayakan umat beragama agar memiliki daya tangkal terhadap gerakan keagamaan yang transnasional yang tidak sejalan dengan kultur dan nilai ajaran agama yang ada di Indonesia, membina dan mengembangkan sikap kerukunan dan keharmonisan dalam kerukunan antar dan intern umat beragama.

Munculnya kesadaran beragama pada umumnya didorong oleh adanya keyakinan keagamaan yang merupakan keadaan yang ada pada diri seseorang. Kesadaran beragama merupakan konsistensi antara pengetahuan dan kepercayaan pada agama sebagai unsur kognitif, perasaan terhadap agama sebagai unsur afektif (perasaan ini bisa dilihat dari motivasi beragama seseorang), dan perilaku keagamaan sebagai unsur psikomotor.

Oleh karena itu, kesadaran beragama merupakan interaksi secara kompleks antara pengetahuan agama, motivasi beragama, dan perilaku keagamaan dalam diri seseorang. Dengan kesadaran itulah akhirnya lahir tingkah laku keagamaan sesuai dengan kadar ketaatan seseorang terhadap agama yang diyakininya.

B. Pengertian Status, Peran dan Tokoh Agama

Pemuka agama, kiai atau ustadz, romo atau pastor, dalam kehidupan social memiliki peran dan pengaruh

penting. Peranan penting di sini karena pemuka agama dalam stratafikasi atau struktur sosial menempati posisi atau status sebagai pemimpin (informal) dalam hal sosial keagamaan tanpa perlu adanya sebuah prosesi pengangkatan. Masyarakat memberikan pengakuan dan penghormatan terhadap pemuka agama karena kapasitas keilmuan agamanya dan moralitasnya.

Peran di sini lahir karena posisi atau status yang melekat pada pemuka agama atau seseorang dalam struktur sosialnya. Dengan demikian, kedudukan (status) dengan peranan tidak dapat dipisahkan karena satu sama lain saling bergantung. Status diartikan sebagai tempat atau posisi seseorang dalam suatu kelompok social. Tidak ada peranan tanpa ada kedudukan atau tak akan ada kedudukan tanpa peranan.

Seseorang yang melaksanakan hak dan kewajibannya sesuai dengan kedudukannya, berarti dia menjalankan suatu peranan. Peran diartikan sebagai apa yang dilakukan oleh seseorang (pemuka agama) dalam posisinya. Peran juga diartikan sebagai perangkat tingkah yang diharapkan dimiliki oleh orang yang berkedudukan di masyarakat. Sedangkan tindakan yang dilakukan oleh seseorang dalam status sosialnya disebut sebagai peranan.

Menurut Levinson, seperti dikutip Soerjono Soekanto, posisi merupakan unsur statis yang hanya menunjukkan tempat individu dalam kelompok masyarakat. Sedangkan peranan lebih banyak menunjuk pada fungsi seseorang dengan mencakup tiga hal.

- a. Peranan meliputi norma-norma yang dihubungkan dengan posisi atau tempat seseorang dalam masyarakat. Peranan dalam arti ini merupakan rangkaian peraturan-peraturan yang membimbing seseorang dalam kehidupan kemasyarakatan.
- b. Peranan merupakan suatu konsep tentang apa yang dapat dilakukan oleh individu dalam masyarakat sebagai organisasi.
- c. Peranan juga dapat dikatakan sebagai perilaku individu yang penting bagi struktur sosial masyarakat.

Sedangkan untuk pengertian pemuka atau tokoh agama, seperti yang tertera pada Peraturan Bersama Menteri Agama dan Menteri Dalam Negeri Nomor 9 dan 8 tahun 2006, adalah tokoh komunitas umat beragama baik yang memimpin ormas keagamaan maupun yang tidak memimpin ormas keagamaan yang diakui dan atau dihormati oleh masyarakat setempat sebagai panutan.

Dalam analisa Kartini Kartono, pemuka agama bisa dikategorikan sebagai pemimpin informal yang tidak perlu pengangkatan formal, namun karena sejumlah kualitas unggul yang dimilikinya sehingga mencapai kedudukan sebagai orang yang mampu mempengaruhi kondisi psikis dan perilaku suatu kelompok atau masyarakat. Dalam hal ini, sebagai pemimpin informal, pemuka agama didasarkan atas akseptasi atau pengakuan dan kepercayaan masyarakat.

Dengan demikian, pemuka agama dengan sejumlah kualitas pribadinya, yakni kualitas keilmuan agamanya,

moralitasnya dan juga atas dasar penerimaan dan penghormatan dari masyarakat atau kelompok umat beragama, cenderung memiliki kharisma. Istilah kharisma erat kaitannya dengan teologi dan menunjuk pada daya tarik pribadi yang ada pada seseorang sebagai pemimpin agama. Artinya, kharisma ini menyangkut bakat rahmat yang diberikan Tuhan kepada orang-orang tertentu sebagai pemimpin agama.

Kharisma ini digunakan oleh Weber untuk menggambarkan pemimpin-pemimpin agama di mana dasar dari kepemimpinan itu adalah kepercayaan dari masyarakat bahwa pemuka atau pemimpin agama memiliki suatu hubungan khusus dengan ilahi, atau mampu mewujudkan karakteristik- karakteristik ilahi itu sendiri.

Dalam analisa Weber, istilah kharisma akan diterapkan pada suatu mutu tertentu yang terdapat pada keperibadian seseorang, yang karenanya terpisah dari orang biasa dan diperlakukan sebagai orang yang dianugerahi dengan kekuasaan atau mutu yang bersifat adiduniawi, luar biasa, atau sekurang-kurangnya merupakan kekecualian dalam hal-hal tertentu.

Pemuka agama Katolik, dalam istilah bahasa Indonesia, disebut dengan istilah romo atau pastor, padri atau bapak. Istilah panggilan bapak ini juga merujuk pada penggunaan dalam bahasa Jawa. Tetapi umat Katolik yang tinggal di luar Pulau Jawa biasa memanggil dengan sebutan Pastor. Sebutan bapak juga didasarkan pada 1

Korintus 4:15 dan 1 Tesalonika 2:11-12. Untuk istilah Pastor dalam Efesus 4:11 disebut dengan gembala. Secara khusus dalam Al Kitab menyebut istilah gembala dalam dua hal. Pertama, Gembala dikaitkan dengan tugas memelihara ternak (Kejadian 4:2, 29:9, 37:2 ; 1 Samuel 16:11, 17:15, Kel 22:5, 33:1, Lukas 2:8), dan kedua, gembala dipandang sebagai pemimpin (2 Samuel 5:2, 1 Raja-raja 22:17, Yeremia 3:15, Zak 10:2, 11:6, Bilangan 27:17, Yehezkiel 13:15, 34:23,31; Mikha5:4).

Pemuka agama dalam Islam biasa disebut dengan panggilan kiai atau ustadz. Sebutan ini merujuk pada kata sapaan untuk seseorang yang pandai dalam ilmu agama Islam (alim ulama) atau guru agama. Dalam konteks masyarakat Indonesia kiai dianggap sebagai orang yang memiliki kepandaian dalam ilmu keagamaan dan dianggap paling berwewenang (punya otoritas) dalam menafsirkan hal-hal yang bersifat keagamaan.

C. Konsep Kerukunan Umat Beragama

Istilah kerukunan, dalam konteks Indonesia sebagai bangsa yang multi agama dan kultur, mulai muncul dari pidato K.H. M. Dachlan sebagai Menteri Agama pada masa orde baru yang kemudian menjadi istilah baku dalam berbagai peraturan perundangan-undangan seperti Keputusan Presiden atau Keputusankeputusan Menteri Agama dan peraturan lainnya.

Secara etimologis kata kerukunan berasal dari kata rukun. Di dalam Kamus Besar Bahasa Indonesia kata rukun memiliki arti sebagai berikut: rukun (adjective) berarti: baik dan

damai; tidak bertengkar. Sedangkan kata kerukunan berarti (noun): perihal hidup rukun, rasa rukun. Jadi, kerukunan hidup umat beragama bisa diartikan sebagai hidup rukun dalam suasana baik dan damai, tidak bertengkar antar umat beragama.

Rukun, menurut Niels Mulder seperti dikutip oleh Franz Magnis Suseno berada dalam keadaan selaras, tenang dan tentram, dan tanpa perselisihan dan pertentangan. Artinya, hidup rukun (umat beragama) atau yang disebut dengan keadaan rukun berarti semua pihak berada dalam keadaan damai satu sama lain, suka bekerja sama, saling menerima, dalam suasana tenang dan sepakat. Atau dalam pengertian sehari-hari.

Pengertian dari kata rukun dan kerukunan adalah damai dan perdamaian. Bilamana kata kerukunan dipergunakan dalam konteks yang lebih luas, seperti antar golongan atau antar bangsa, pengertian rukun ditafsirkan sesuai tujuan, kepentingan dan kebutuhan.

Hal inilah yang kemudian memunculkan istilah kerukunan sementara, politis dan hakiki. Kerukunan sementara adalah kerukunan yang dituntut oleh situasi seperti menghadapi musuh bersama. Jika musuh yang dihadapi bersama sudah tidak ada, maka keadaan akan kembali seperti semula, yakni kembali berkonflik.

Kerukunan politis adalah kerukunan di mana biasanya terjadi dalam keadaan peperangan yang kemudian untuk sementara waktu mengadakan perdamaian atau bersepakat

untuk melakukan gencatan senjata sampai waktu yang ditentukan. Kedua kerukunan ini merupakan kerukunan yang semu. Sedangkan untuk kerukunan hakiki adalah kerukunan yang didorong oleh kesadaran dan hasrat bersama demi kepentingan bersama.

Dengan demikian, kerukunan yang dibutuhkan oleh segenap umat beragama adalah kerukunan hakiki, bukan kerukunan semu, tetapi kerukunan murni yang mempunyai nilai dan harga yang tinggi dan bebas dari segala pengaruh dan hipokrisi yang dilandasi dan dijiwai oleh ajaran agama masing-masing.

Berdasarkan beberapa pengertian di atas, kerukunan umat beragama mengandung beberapa unsur penting yaitu: Pertama, kesediaan untuk menerima adanya perbedaan keyakinan dengan orang atau kelompok lain. Kedua, kesediaan membiarkan orang lain untuk mengamalkan ajaran yang diyakininya. Ketiga, kemampuan untuk menerima perbedaan selanjutnya menikmati suasana kesahduan yang dirasakan orang lain sewaktu mereka mengamalkan ajaran agamanya. Dan Keempat, kemauan untuk saling menghormati dan bekerjasama. Kerukunan itu bisa muncul dalam dua aspek yang saling terkait sebagai bagian dari konsep kerukunan.

Aspek pertama adalah kerukunan yang bersifat eksklusif, yaitu meyakini secara absolut kebenaran ajaran agama yang dianut dan dipilihnya sebagai jalan hidup tanpa membuka diri terhadap kebenaran lain. Artinya, setiap orang punya hak dan kebebasan yang sama dalam memilih dan menentukan keyakinannya tanpa kemudian

saling mempertentangkan klaim kebenaran ajaran agama masing-masing. Dengan demikian, tidak tepat jika kemudian ada upaya untuk membujuk, apalagi memaksa, orang yang berbeda keyakinan untuk percaya dan pindah terhadap kepercayaan dan keyakinan yang lain. Karena keyakinan terhadap ajaran agama tidak mungkin muncul dan tercipta karena adanya sebuah bujukan dan paksaan, namun lahir dari kepercayaan dan keyakinan yang mendalam dan sungguh-sungguh.

Aspek kedua adalah kerukunan yang bersifat inklusif, yaitu perilaku keberagamaan yang dilandasi oleh perasaan yang penuh menghormati, menghargai, dan membebaskan dan bahkan saling mendukung orang lain mengamalkan keyakinannya. Bahkan dengan hal ini bisa ikut merasakan kekhusyuk atau kesahduan orang lain dalam mengamalkan ajaran agamanya.

Sedangkan untuk konsep kerukunan umat beragama yang secara resmi digunakan oleh pemerintah mencakup tiga kerukunan, yaitu: Kerukunan intern umat beragama, Kerukunan antar umat beragama, Kerukunan antara umat beragama dengan Pemerintah.

Konsep kerukunan ini dikenal dengan istilah Trilogi Kerukunan yang dicetuskan pertama kali oleh Menteri Agama H. Alamsjah Ratu Perwiranegara. Tentunya, kerukunan hidup beragama bukan sekedar terciptanya keadaan dimana tidak ada pertentangan intern umat beragama, antar umat beragama dan antara umat beragama dengan pemerintah. Namun kerukunan itu adalah hubungan harmonis dalam

dinamika pergaulan dan kehidupan bermasyarakat yang saling menguatkan dan diikat oleh sikap mengendalikan diri dalam wujud:

- a. Saling menghormati kebebasan menjalankan ibadat sesuai dengan agamanya.
- b. Saling menghormati dan bekerja sama intern pemeluk agama, antar umat beragama dan antara umat beragama dengan pemerintah yang sama-sama bertanggungjawab membangun Bangsa dan Negara.
- c. Saling tenggang rasa dengan tidak memaksakan agama kepada orang lain.

Kerukunan atau keadaan hidup rukun umat beragama itu harus dikehendaki secara sadar dan bebas tanpa ada paksaan. Setiap orang terdorong oleh semangat kerukunan yang sungguh-sungguh, atau memang ingin rukun, butuh hidup damai dan tenang, bukan karena sekedar ingin dikatakan rukun. Kerukunan tidak berhenti asal tidak saling mengganggu atau tidak saling merugikan, tetapi harus tampak dalam sebuah bentuk kerjasama. Kerjasama ini tercipta melalui sebuah interaksi, terbina melalui komunikasi yang akrab.

Sehingga kemudian terbentuk kerjasama yang saling membutuhkan dan menguatkan. Kerukunan semacam ini merupakan kerukunan yang dinamis dan fungsional. Kerukunan ini dilandasi dengan semangat kerukunan sejati, bukan kerukunan yang pura-pura atau semu.

D. Konsep Konflik Umat Beragama

Dalam kehidupan sosial (umat beragama), konflik bersifat inheren sebagai bagian yang tidak terpisahkan dari realitas kehidupan. Konflik senantiasa ada dalam setiap waktu, di mana saja dan kapan saja. Oleh karenanya, konflik dan kerukunan merupakan gejala yang selalu ada dalam kehidupan umat beragama.

Munculnya konflik dan kerukunan didorong karena adanya perbedaan dan persamaan kepentingan. Apalagi manusia dipersepsi sebagai makhluk konfliktis (*homo conflictus*), yaitu makhluk yang selalu terlibat dalam perbedaan, pertentangan, dan persaingan baik secara sukarela ataupun terpaksa.

Konflik, secara etimologis, berasal dari bahasa latin „con yang berarti bersama dan fligere yang berarti benturan atau tabrakan. Konflik berarti benturan kepentingan, keinginan, pendapat dan hal lainnya yang melibatkan dua pihak atau lebih. Secara sederhana, konflik diartikan sebagai perselisihan atau pertentangan antara dua pihak (individu atau kelompok) di mana salah satu pihak atau semua pihak sama-sama ingin menyingkirkan pihak lain dengan cara menghancurkannya atau membuatnya tidak berdaya.

Konflik itu terjadi, secara garis besar disebabkan oleh: Pertama, Kemajemukan Horizontal, di mana struktur masyarakat yang majemuk dari segi agama, etnis, ras dan budaya menjadi penyebab terjadinya konflik karena masing-masing ingin mempertahankan identitas dan

karakteristiknya masing-masing. Dalam konstruk masyarakat yang demikian ini, jika belum ada konsensus nilai yang menjadi pegangan bersama, konflik dapat menimbulkan kekerasan dan peperangan. Kedua, Kemajemukan Vertikal, di mana dalam struktur masyarakat ada polarisasi berdasarkan kekayaan, pendidikan dan kekuasaan.

Kemajemukan vertikal bisa menimbulkan konflik karena ada sekelompok kecil masyarakat yang memiliki kekayaan, pendidikan yang mapan, kekuasaan dan kewenangan yang besar sementara sebagian besar yang lain sebaliknya. Artinya, akses dan distribusi sumber-sumber nilai yang tidak merata menyebabkan kepincangan di dalam masyarakat dan menyebabkan terjadinya konflik.

Konflik umat beragama menjadi bagian dari berbagai macam konflik yang terjadi dalam konteks ke-Indonesiaan. Konflik umat beragama diartikan dengan terjadinya ketegangan dan kekerasan menyangkut persoalan agama atau simbol-simbol agama yang berakibat pada kerusakan fisik dan jatuhnya korban jiwa.

Konflik yang kerap mewarnai dinamika kehidupan umat beragama di Indonesia dari awal Orde Baru hingga Reformasi adalah persoalan perjumpaan Islam dan Kristen/Katolik yang dinamis dan fluktuatif. Konflik berawal dari kecurigaan dan kebencian antar kedua agama terkait persoalan kristenisasi atau penyebaran agama dan pendirian rumah ibadah di daerah-daerah yang diasosiasikan dengan identitas agama tertentu.

Misalkan daerah Aceh diasosiasikan dengan Islam, Papua dengan identitas Kristennya, atau Suku Madura dengan Identitas Islamnya. Kerentanan yang awalnya hanya dipicu oleh segregasi social berbasis etnis, kemudian dipertajam dengan segregasi sosial berbasis identitas etnis yang diasosiasikan dengan agama tertentu. Kondisi inilah yang mewarnai konflik Islam-Kristen sejak awal Orde Baru hingga era Reformasi, bahkan dalam kondisi Indonesia kekinian.

Ma`ruf Amin menjelaskan bahwa penyebab terjadinya konflik antar umat beragama, secara mendalam disebabkan oleh dua hal; pertama, lemahnya ideology kerukunan dalam salah satu atau masing-masing umat beragama sehingga mempengaruhi cara pandang dan sikap terhadap agama lain dengan pola curiga, menuduh, dan mendeskreditkan, bahkan menyingkirkan. Kedua, penyiaran agama sebagai salah satu bentuk provokasi dan distorsi terhadap ajaran agama lain. Sehingga mengakibatkan terjadinya efek balik dari umat agama lain yang Terprovokasi.

Lebih jauh disebutkan, bahwa konflik antar umat beragama atau konflik yang bernuansa agama yang terjadi di Indonesia disebabkan oleh beberapa faktor, seperti pemahaman keagamaan yang literal dan radikal, kepentingan politik dan ekonomi, pendirian rumah ibadah, penyiaran agama, salah faham informasi di antara pemeluk agama, tidak efektifnya penegakan hukum dan juga kurangnya pengembangan sistem pencegahan konflik secara dini. Ini menegaskan bahwa konflik yang melibatkan umat beda agama yang terjadi di Indonesia semua tidak disebabkan

oleh akar tunggal yakni agama, namun dari akar serabut yang dipicu oleh banyak faktor, seperti kepentingan politik kelompok tertentu, kepentingan ekonomi, dan lemahnya penegakan hukum. Sedangkan konflik yang disebabkan oleh faktor agama terkait pendirian rumah ibadah dan penyiaran agama, serta hal lain yang menyangkut persosalan dan simbol agama.

E. Kesadaran Beragama

Secara bahasa, kesadaran berasal dari kata dasar “sadar” yang mempunyai arti; insaf, yakin, merasa, tahu dan mengerti. Kesadaran berarti; keadaan tahu, mengerti, dan merasa ataupun keinsafan. Arti kesadaran yang dimaksudkan disini adalah keadaan tahu, ingat ataupun keinsafan atas dirinya sendiri kepada keadaan yang sebenarnya.

Sedangkan kata beragama berasal dari kata dasar “agama”. Agama berarti kepercayaan kepada Tuhan (dewa dan sebagainya) dengan ajaran kebaktian dan kewajiban-kewajiban yang bertalian dengan kepercayaan itu, misalnya Islam, Kristen, Hindu, Budha dan lain-lain, sedangkan kata beragama berarti memeluk (menjalankan) agama, beribadah, taat kepada agama di sepanjang hidupnya.

Sedangkan menurut Harun Nasution pengertian agama berdasarkan asal kata, yaitu al-Din, religi (relege, religare) dan agama. Al-Din (Semit) berarti undang- undang atau hukum. Kemudian dalam dalam bahasa Arab, kata ini mengandung arti menguasai, menundukkan, patuh, utang, balasan, kebiasaan. Sedangkan dari kata religi (Latin) atau relegare

berarti mengumpulkan dan membaca. Kemudian religare berarti mengikat.

Adapun kata agama terdiri dari (a= tidak; gam= pergi) mengandung arti tidak pergi, tetap ditempat atau diwarisi turun-temurun. Berdasarkan penjelasan diatas menurut Harun Nasution, intisarinnya adalah ikatan. Karena itu agama mengandung arti ikatan yang harus dipegang dan harus dipatuhi manusia. Ikatan dimaksud berasal dari suatu kekuatan yang lebih tinggi dari manusia sebagai kekuatan gaib yang tidak dapat ditangkap melalui panca indera, namun memiliki pengaruh yang besar sekali terhadap kehidupan manusia sehari-hari.

Kesadaran beragama meliputi rasa keagamaan, pengalaman ke-Tuhanan, keimanan, sikap dan tingkah laku keagamaan yang terorganisasi dalam sistem mental dari kepribadian. Karena agama melibatkan seluruh fungsi jiwa-raga manusia, maka kesadaran bergama pun mencakup aspek-aspek afektif, kognitif dan motorik. Keterlibatan fungsi afektif terlihat didalam pengalaman keTuhanan, rasa keagamaan dan kerinduan kepada Tuhan. Aspek kognitif nampak dalam keimanan dan kepercayaan.

Sedangkan keterlibatan fungsi motorik nampak dalam perbuatan dan gerakan tingkah laku keagamaan. Dalam kehidupan sehari-hari, aspek-aspek tersebut sukar dipisahkan karena merupakan suatu sistem kesadaran beragama yang utuh dalam kepribadian seseorang. Kesadaran agama adalah bagian atau segi yang hadir (terasa) dalam pikiran dan dapat dilihat gejalanya melalui introspeksi. Disamping itu dapat

dikatakan bahwa kesadaran beragama adalah aspek mental atau aktivitas agama; sedangkan pengalaman agama adalah unsur perasaan dan kesadaran beragama, yaitu perasaan yang membawa kepada keyakinan yang dihasilkan oleh tindakan.

Dalam kesadaran beragama dan pengalaman beragama, menggambarkan sisi batin seseorang yang terkait dengan sesuatu yang sakral dan dunia ghaib. Dari kesadaran dan pengalaman agama tersebut, muncul sikap keagamaan yang ditampilkan seseorang. Sikap keagamaan merupakan suatu keadaan yang ada dalam diri seseorang yang mendorongnya untuk bertingkah laku sesuai dengan ketaatannya pada agama yang dianutnya.

Sikap tersebut muncul karena adanya konsistensi antara kepercayaan terhadap agama sebagai unsur kognitif, perasaan terhadap agama sebagai unsur afektif dan perilaku terhadap agama sebagai unsur konatif. Jadi sikap keagamaan merupakan integrasi secara kompleks antara pengetahuan, perasaan serta tindak keagamaan dalam diri seseorang. Pencapaian kesadaran beragama dapat dipengaruhi oleh beberapa faktor, diantaranya:

- a. Faktor psikologis, individu yang memiliki jiwa yang tidak sehat maka internalisasi nilai-nilai agama dalam dirinya tidak dapat diaplikasikan dalam perilaku sehari-hari. Individu tersebut belum dapat menselaraskan antara nilai-nilai agama dengan tingkah laku dan perbuatannya, oleh karena itu jiwa yang tidak sehat akan mengurangi rasa keberagamaannya.

b. Faktor umur, individu yang memasuki usis remaja dan dewasa akan dapat memiliki rasa kesadaran beragama yang tinggi disebabkan saat memasuki usia ini biasanya individu tersebut memiliki semangat pencarian terhadap nilai-nilai kebenaran agamanya yang sangat tinggi.

c. Faktor kelamin, individu yang berjenis kelamin laki-laki lebih memiliki rasa kesadaran beragama dibanding wanita. Hal ini disebabkan adanya tuntutan masyarakat yang membuat laki-laki menjadi lebih aktif, mandiri dan kompetitif, sementara wanita menjadi pasif tergantung dan konformis.

d. Faktor pendidikan dan kecerdasan, seseorang yang memiliki tingkat kecerdasan yang tinggi akan mampu merefleksikan nilai-nilai keagamaan yang diyakini kebenarannya pada kehidupannya sehari-hari.

F. Aspek-aspek Kesadaran Beragama

1. Aspek Kesadaran

a. Pemujaan atau pengalaman spiritual

Pemujaan adalah suatu ungkapan perasaan, sikap dan hubungan. Menurut Malinowski sebagaimana yang dikutip oleh Thomas F. O'Dea bahwa; perasaan, sikap dan hubungan ini diungkapkan tidak memiliki tujuan selain dalam dirinya sendiri, mereka merupakan tindakan yang mengungkapkan. Sedangkan pengalaman spiritual mempunyai nilai miseri yang terkait dalam dirinya sehingga kita tidak dapat menalarkannya

secara penuh.

Hubungan yang diungkapkan dalam pemujaan maupun pengalaman spiritual tersebut merupakan hubungan dengan obyek suci. Sehingga dalam hubungannya dengan sesuatu yang suci tersebut dapat membangkitkan daya pikirannya yang selanjutnya mereka menghayati dan meyakini bahwa ada sesuatu yang obyanya bersifat suci untuk dijadikan sebagai tempat dan tujuan pengabdian diri. Kesadaran ini timbul akibat adanya ungkapan perasaan, sikap dan hubungan antara manusia dengan sesuatu yang dianggap suci.

b. Hubungan sosial

Teori fungsional memandang sumbangan agama terhadap masyarakat dan kebudayaan berdasarkan atas karakteristik pentingnya, yakni transedensi pengalaman sehari-harinya dalam lingkungan alam, dan manusiapun membutuhkan sesuatu yang mentransendensi pengalaman untuk kelestarian hidupnya, karena:

- 1) Manusia hidup dalam ketidakpastian, sebagai hal yang sangat penting bagi keamanan dan kesejahteraan manusia di luar jangkauannya. Dengan kata lain eksistensi manusia ditandai dengan ketidak pastian.
- 2) Kesanggupan manusia untuk mengendalikan dan untuk mempengaruhi kondisi hidupnya, walaupun kesanggupan tersebut semakin meningkat. Pada titik dasar tertentu, kondisi manusia dalam kondisi konflik antara keinginan diri dengan lingkungan yang ditandai oleh ketidakberdayaan.

3) Manusia harus hidup bermasyarakat, dan masyarakat merupakan suatu alokasi yang teratur dari berbagai fungsi, fasilitas, dan ganjaran. Pengalaman manusia dalam konteks ketidakpastian dan ketidakberdayaan membawa manusia keluar dari perilaku sosial dan batasan cultural dari tujuan dan norma sehari-hari, maka sebagai konsekuensinya manusia harus mengembalikan ketidakpastian dan ketidakberdayaan tersebut kepada kesadarannya untuk menuntunnya dalam mentaati norma-norma masyarakat untuk menuntunnya dalam mencapai ketentraman hidupnya.

c. Pengalaman dan pengetahuan

Menurut Robert W. Crapps, bahwa kebenaran harus ditemukan, bukan hanya melalui argument logis dan teoritis, tetapi melalui pengamatan atas pengalaman maka jalan lapang menuju ke kesadaran keagamaan adalah melalui pengalaman yang diungkapkan orang.

Kesadaran dapat terjadi setelah seseorang memang benar-benar memahami, menghayati, dan mengamalkan ajaran agama yang didapat dari pengalaman, sehingga proses kesadaran seperti ini adalah adanya perpindahan pengalaman atau pengetahuan keagamaan dari seseorang yang dilaksanakan dengan secara konsisten dan konsekuen.

d. Eksperimen

Eksperimen merupakan proses yang memiliki kemiripan dengan behaviorisme. Kemiripan itu terletak pada usaha untuk

menggali arti melalui pengamatan (observasi) dan penguraian perilaku secara teliti. Dalam penyelidikan empiris teori psikoanalisis tentang agama berusaha mengadakan secara eksperimental tiga hipotesis yang diambil dari psikoanalisis; bahwa bila teori analisis tentang perilaku keagamaan benar, maka prosedur eksperimen juga harus dapat menunjukkan sebagai berikut:

- a) Bahwa semakin besar religiusitas seseorang, maka semakin besar kecenderungan seseorang untuk membuat proyeksi.
- b) Bahwa perasaan dan konsep seseorang tentang Tuhan berkorelasi dengan perasaan dan konsep seseorang tentang orang tua mereka.
- c) Bahwa orang laki-laki memiliki kecenderungan yang lebih besar daripada orang perempuan dalam memandang Tuhan sebagai tokoh penghukum.

Kesadaran juga dapat timbul dengan adanya eksperimen, dimana penghayatan dan pengalaman agama dapat terlaksana secara baik setelah seseorang yang beragama telah memandang dan mengakui kebenaran agama sebagai sesuatu yang penting dalam kehidupannya, bahwa seseorang akan merasa damai dan tenteram dalam kehidupannya setelah mereka mendekatkan diri kepada sesuatu yang dipercayainya (Allah SWT) dan menyerahkan kembali segala persoalan yang dihadapinya hanya kepadanya daripada seseorang yang tak kenal agama.

Hal ini akan membuktikan bahwa kesadaran akan

muncul setelah seseorang mengetahui hasil dari eksperimen tentang agama tersebut benar-benar dirasakan sebagai suatu hal yang memang dibutuhkan dalam kehidupannya.

2. Dimensi Keagamaan

Menurut Glock dan Stark sebagaimana dikutip oleh Jalaluddin Rahmat, bahwa mereka telah membagi dimensi keagamaan menjadi lima bagian, yaitu: dimensi ideologi, dimensi ritualistik, dimensi eksperensial, dimensi inetelktual, dan dimensi konsekeuensial.

a. Dimensi Ideologi

Bagian dari keberagamaan yang berkaitan dengan apa yang harus dipercayai. Kepercayaan atau doktrin agama adalah dimensi yang paling dasar. Inilah yang membedakan antara agama yang satu dengan agama yang lainnya. Ada tiga kategori kepercayaan. Pertama, kepercayaan yang menjadi dasar esensial suatu agama, yaitu percaya adanya Tuhan dan utusannya dalam agamanya. Kedua, kepercayaan yang berkaitan dengan tujuan Ilahi dalam penciptaan manusia.

Ketiga, kepercayaan yang berkaitan dengan cara terbaik untuk melaksanakan tujuan Ilahi tersebut, seperti orang Islam harus percaya bahwa untuk beramal shaleh mereka harus melakukan pengabdian kepada Allah SWT dan perkhidmatan kepada sesama manusia.

b. Dimensi ritualistik

Dimensi ritualistic adalah dimensi keberagamaan yang

berkaitan dengan sejumlah perilaku, yang dimaksud dengan perilaku disini bukanlah perilaku umum yang dipengaruhi keimanan seseorang melainkan mengacu kepada perilaku-perilaku khusus yang ditetapkan oleh agama, seperti tata cara ibadah, pembaptisan, pengakuan dosa, berpuasa, atau menjalankan ritus-ritus khusus pada hari-hari yang suci, seperti ritualistic dalam agama Islam adalah menjalankan sholat dengan menghadap kiblat berserta ruku' dan sujudnya.

c. Dimensi eksperensial

Dimensi eksperensial berkaitan dengan perasaan keagamaan yang dialami oleh penganut agama atau dalam psikologi dapat dikatakan dengan *religious experiences*. Pengalaman keagamaan ini bisa saja terjadi sangat moderat, seperti kekhusukan di dalam menjalankan shalat untuk agama Islam. Pengalaman keagamaan adalah suatu pengalaman mengenai kekuasaan atau kekuatan, pengalaman keagamaan juga merupakan tanggapan terhadap hal atau peristiwa yang dialami sebagai hal yang suci, yakni suatu pelepasan dari kekuasaan yang menanamkan suatu tanggapan tertentu yang sama-sama memadukan rasa hormat yang dalam dan daya tarik yang kuat.

d. Dimensi intelektual

Setiap agama memiliki sejumlah informasi khusus yang harus diketahui oleh para pengikutnya. Ilmu fikih dalam Islam menghimpun informasi tentang fatwa ulama berkenaan dengan ritus-ritus keagamaan. Sikap orang dalam

menerima atau menilai ajaran agamanya berkaitan erat dengan pengetahuan agama yang dimilikinya. Orang yang sangat dogmatis tidak mau mendengarkan pengetahuan dari kelompok manapun yang bertentangan dengan keyakinan agamanya.

e. Dimensi konsekuensial

Dimensi konsekuensial menunjukkan akibat ajaran agama dalam perilaku umum yang tidak secara langsung dan secara khusus ditetapkan agama (seperti dalam dimensi ritualistic). Inilah efek ajaran agama pada perilaku individu dalam kehidupannya sehari-hari. Efek agama ini bias jadi positif atau negative baik pada tingkat personal maupun sosial. Dimensi ini mengacu pada kebutuhan manusia terhadap agama, bahwa pentingnya agama dalam kehidupan sehari-hari manusia. Kehidupan manusia yang penuh dengan persoalan ini harus dikembalikan kepada agama dalam penyelesaiannya agar ditemukan kedamaian dan kesejahteraan.

3. Aspek-aspek kesadaran keagamaan

a. Aspek afektif dan konatif

Bahwa yang menjadi keinginan dan kebutuhan manusia itu bukan hanya terbatas pada kebutuhan biologis saja, namun manusia juga mempunyai keinginan dan kebutuhan yang bersifat rohaniyah, yaitu kebutuhan dan keinginan untuk mencintai dan dicintai Tuhan. Agama merupakan kebutuhan rohaniyah manusia, dimana seseorang tidak bisa

hidup tanpa agama.

Hal ini mengakibatkan seseorang selalu mendambakan agama dalam kelangsungan hidupnya. Setelah mereka menemukan dan bergabung dalam agama dengan perasaan ingin mengabdikan dirinya kepada Tuhan, maka keadaan jiwanyapun akan terasa tenang dan damai. Mereka akan mencintai dan mengalami kerinduan terhadap Tuhan.

b. Aspek kognitif

Aspek kognitif merupakan aspek yang juga menjadi sumber jiwa agama pada diri seseorang (yaitu melalui berfikir), manusia bertuhan karena menggunakan kemampuan berfikirnya. Sedangkan kehidupan beragama merupakan refleksi dari kemampuan berfikir manusia itu sendiri. Manusia juga menggunakan fikirannya untuk merenungkan kebenaran atau kesalahan menuju keyakinan terhadap ajaran agama. Adapun hal-hal yang berhubungan dengan aspek kognitif dalam kesadaran beragama, yaitu:

- 1) Kecerdasan Qalbiyah, yaitu Kecerdasan qalbiyah yaitu kecerdasan untuk mengenal hati dan aktifitas-aktifitasnya, mengelola dan mengekspresikan jenis-jenis kalbu secara benar, memotivasi kalbu untuk membina hubungan moralitas dengan orang lain dan hubungan ubudiyah dengan Tuhan.
- 2) Kecerdasan emosional, yaitu kecerdasan yang berkaitan dengan pengendalian nafsu-nafsu impulsive dan agresif, sehingga seseorang akan terarah untuk bertindak secara hati-hati, waspada, tenang, sabar dan

tabah ketika mendapat musibah dan berterima kasih ketika mendapat kenikmatan.

3) Kecerdasan moral, yaitu Kecerdasan moral adalah kecerdasan yang berkaitan dengan hubungan kepada sesama manusia dan alam semesta. Kecerdasan ini mengarahkan seseorang untuk berbuat baik.

4) Kecerdasan spiritual, yaitu Kecerdasan spiritual adalah kecerdasan yang berhubungan dengan kualitas batin seseorang dalam meyakini ajaran agama.

5) Kecerdasan beragama, yaitu Kecerdasan beragama adalah kecerdasan yang berhubungan dengan kualitas beragama pada diri seseorang. Kecerdasan ini mengarahkan pada diri seseorang untuk berperilaku agama secara benar, sehingga menghasilkan ketaqwaan dan keimanan secara mendalam.

c. Aspek motorik

Aspek motorik dalam kesadaran beragama merupakan aspek yang berupa perilaku keagamaan yang dilakukan seseorang dalam beragama. Adapun aspek-aspek tersebut dapat berupa:

1) Kedisiplinan shalat adalah ketaatan, kepatuhan, keteraturan, seseorang di dalam menunaikan ibadah shalat.

2) Menunaikan puasa merupakan menahan diri dari segala sesuatu yang membatalkan puasa, seperti menahan makan, minum, nafsu, menahan berbicara

yang tidak berguna dan sebagainya dengan disertai niat.

3) Berakhlak baik merupakan ketaatan, patuh pada aturan-aturan dan ketentuan yang diatur oleh Allah SWT dan RasulNya.

AGAMA SEBAGAI PEREKAT SOSIAL PADA MASYARAKAT MULTIKULTURAL

Dr. Husna Amin, M.Hum

A. Pendahuluan

Agama merupakan fenomena universal manusia. Selama ini belum pernah ada laporan penelitian dan kajian yang menyatakan bahwa ada sebuah masyarakat yang tidak mempunyai konsep tentang agama, termasuk Indonesia yang multikultural. Meskipun perubahan sosial telah mengubah orientasi dan makna agama, namun hal itu sampai pada meniadakan eksistensi agama.

Sehingga kajian tentang agama selalu akan terus berkembang dan tetap menjadi sebuah kajian penting seiring dengan perkembangan ilmu pengetahuan. Karena sifat universalitas agama dalam masyarakat, maka kajian tentang masyarakat tidak akan lengkap tanpa melihat agama sebagai salah satu faktornya.

Keragaman suku yang dimiliki bangsa Indonesia membuat kehidupan kemasyarakatan terlihat dinamis. Hal ini dimungkinkan karena Indonesia merupakan negara terbuka yang tidak membatasi satu wilayah dengan suku tertentu. Setiap orang dari suku dan daerah mana pun bebas

menempati wilayah sepanjang mengikuti aturan-aturan yang berlaku.

Dalam perspektif teori struktural fungsional, agama dipandang sebagai sumber tata nilai yang menjadi sandaran manusia dan masyarakat dalam berperilaku pada kehidupan bermasyarakat. Sementara itu dalam perpektif antropologis-sosiologis, agama juga ditengarai sebagai produk manusia dan masyarakat sebagaimana budaya. Bahkan agama dalam pandangan antropologis dianggap sebagai bagian dari budaya.

Jika agama merupakan bagian dari budaya, maka permasalahan yang muncul adalah apakah agama masih memiliki peran dalam mempersatukan berbagai kelompok etnis, sementara masing-masing etnik memiliki kultur dan adat istiadat berbeda yang oleh penganutnya dianggap memiliki kebenaran mutlak. Bahkan masing-masing etnik memiliki kecenderungan etnosentris, yang memandang budayanya sendiri sebagai superior dan menganggap kultur etnik lainnya sebagai inferior.

B. Agama dalam Berbagai Perspektif

Agama merupakan fenomena universal yang selalu melekat pada diri manusia, karenanya kajian tentang agama selalu akan terus berkembang dan tetap menjadi sebuah kajian penting seiring dengan perkembangan ilmu pengetahuan. Penelitian tentang agama telah banyak dilakukan oleh para ahli, baik para teolog, psikolog, antropolog maupun sosiolog.

Seiring dengan perkembangan kajian agama, telah banyak definisi agama yang dikedepankan para teoritis agama namun di antara mereka tidak ada kesepakatan. Keragaman definisi agama tergantung dari sudut mana para teoritis memandang agama. Teolog melihat agama sebagai seperangkat aturan yang datang dari “Tuhan” sementara bagi para psikolog, antropolog dan sosiolog melihat agama sebagai ekspresi manusia dalam merespon terhadap permasalahan kehidupan yang melingkupi. Berbagai upaya penelusuran terhadap makna dan definisi agama telah banyak dilakukan oleh para pakar, uraian berikut coba dipaparkan beberapa upaya dimaksud.

Dalam perspektif teologis agama dimaknai sebagai seperangkat ajaran yang mengatur hubungan antara manusia dengan Tuhannya, manusia satu dengan manusia lainnya, dan antara manusia dengan alam lingkungannya. Melton Yinger mendefinisikan agama sebagai suatu “sistem keyakinan dan praktek yang digunakan oleh sekelompok masyarakat dalam berhadapan dengan problem-problem ultimate kehidupan manusia, masalah terakhir dari kehidupan ini.

Agama merupakan suatu penolakan untuk menyerah kepada kematian dan pasrah di hadapan frustrasi. Atau istilah lain, agama merupakan sistem kepercayaan dan peribadatan yang digunakan oleh berbagai bangsa dalam perjuangan mereka dalam mengatasi persoalan-persoalan tertinggi dalam kehidupan manusia.

Dunlop punya pendirian senada, Ia melihat bahwa agama merupakan sarana terakhir yang sanggup menolong

manusia bilamana instansi lainnya gagal tak berdaya. Ia merumuskan agama sebagai “suatu lembaga atau bentuk kebudayaan yang menjalankan fungsi pengabdian kepada umat manusia untuk mana tidak tersedia lembaga lain atau yang penanganannya tidak cukup dipersiapkan oleh lembaga lain.

Sementara itu dalam perpektif psikologis, agama dipahami sebagai penyakit mental. Menurut Sigmund Freud agama merupakan neoris obsesional universal manusia; seperti neurosis obsesional anak-anak, dia muncul dari Oedipus Kompleks dari relasinya dengan ayah.

Agama dengan demikian hanya dianggap sebagai kepercayaan dan ajaran yang cocok untuk bangsa manusia di masa kanak-kanak. Ketika manusia masuk dalam kehidupan dewasa, ia harus membuang agama dan menggantinya dengan bentuk-bentuk pemikiran yang sesuai dengan masa dewasa.

Dalam pandangan antropologis, agama merupakan sebuah ekspresi manusia di dalam tanggapannya terhadap yang supernatural, E.B. Tylor memberikan definisi minimum agama sebagai kepercayaan terhadap makhluk-makhluk spiritual. Menurutnya, yang menjadi karakteristik agama adalah kepercayaan pada roh yang berfikir, bertindak, dan merasa seperti manusia.

Esensinya adalah animisme, kepercayaan pada kekuatan pribadi yang hidup di balik semua benda. Definisi demikian secara umum mendapati agama menyerupai magi.

Meski Frazer merasa puas dengan definisi yang disampaikan E.B.Tylor, tetapi ia lebih tertarik dengan perbedaan dari pada persamaan agama dengan magi. Baginya hal yang menarik dari agama adalah justru penolakan agama pada prinsip-prinsip magi.

Meski mendapat dukungan dari Frazer, definisi Tylor bukannya dapat terlepas dari kritikan. Kritikan dilontarkan karena definisi yang diungkapkan Tylor berimplikasi bahwa sasaran sikap keagamaan selalu berupa wujud personal, padahal bukti antropologik menunjukkan bahwa wujud spiritual pun sering dipahami sebagai kekuatan impersonal.

Radcliffe-Brown menawarkan definisi yang dianggap menutupi kekurangan dimaksud. Menurutnya, agama merupakan ekspresi suatu bentuk ketergantungan pada kekuatan di luar diri kita sendiri, yakni kekuatan yang dapat kita katakan sebagai kekuatan spiritual atau kekuatan moral. Dengan pendapat ini dia mendekati perpektif sisiologis Dhurkheim dalam mendefinisikan agama.

Dalam perpektif sosiologis agama merupakan pruduk manusia dalam hubungannya dengan kehidupan bermasyarakat. Dhurkheim memandang agama tidak sekedar gagasan tentang Tuhan dan Roh, dia menekankan ciri kolektif atau sosial. Menurutnya, agama merupakan sekumpulan keyakinan dan praktek yang berkaitan dengan sesuatu yang sakral, yakni sesuatu yang disisihkan dan terlarang-keyakinan dan praktek-praktek yang menyatukan satu komunitas moral tunggal-mereka semua yang tunduk kepadanya.

Uraian di atas menggambarkan betapa para teoritis tidak pernah sepakat tentang definisi agama. Perbedaan definisi yang dilontarkan para teoritis merupakan sebuah kewajaran, hal demikian dimungkinkan kerana perbedaan sudut pandang para teoritis. Meski demikian, dari penelusuran definisi agama yang diungkapkan para teoritis sebagaimana digambarkan di atas.

Pada dasarnya mereka sepakat bahwa yang menjadi inti dari agama adalah adanya kepercayaan terhadap yang supranatural dan adanya seperangkat aturan, tata nilai dan norma-norma yang mengatur hubungan dengan realitas mutlak dan antar sesama manusia dan hubungan dengan lingkungan alam sekitarnya.

Diskursus akademik sebagaimana digambarkan di atas semakin menyadarkan kita bahwa banyak faktor yang mempengaruhi pendefinisian agama, karenanya wajar jika definisi agama yang terpaparkan dalam berbagai literatur terkesan bias akademis. Karena itu, hemat saya dalam konteks Islam secara konseptual hendaknya dikembalikan pada istilah *al Din* sebagaimana aslinya. Sebab kata *al Din* merupakan kata netral dan berlaku pada agama mana pun. Menurut pengamatan Prof. Dadang kata *al Din* merujuk pada nama agama yang bersifat umum, tidak ditujukan kepada salah satu agama, ia adalah nama untuk setiap kepercayaan yang ada di dunia ini.

Hanya saja para teolog memandang bahwa sistem kepercayaan dan seperangkat aturan yang berbentuk norma-norma serta nilai-nilai semuanya datang dari yang mutlak

sementara bagi para psikolog, sosiolog dan antropolog menganggap seperangkat sistem kepercayaan dan peribadatan dimaksud merupakan produk manusia dari hubungannya dengan dirinya sendiri maupun lingkungan masyarakat dan alam sekitarnya.

Dengan demikian dapat disimpulkan bahwa agama adalah sistem kepercayaan dan atau seperangkat aturan yang berupa nilai-nilai dan norma-norma yang mengatur kehidupan manusia dalam berperilaku baik yang menyangkut hubungan dirinya dengan “Tuhan” maupun dengan masyarakat dan alam sekitarnya.

Terlepas dari perbedaan definisi yang dilontarkan para teoritis sebagaimana tergambar di atas yang pasti disepakati adalah bahwa agama bagaimana pun memiliki peran dan fungsi dalam kehidupan manusia baik secara individual maupun sosial.

C. Peran Agama Pada Masyarakat Multikultural.

Secara horizontal, struktur masyarakat Indonesia oleh kenyataan adanya kesatuan-kesatuan sosial berdasarkan perbedaan-perbedaan suku bangsa, agama, adat istiadat serta perbedaan-perbedaan kedaerahan. Secara vertikal struktur masyarakat Indonesia ditandai oleh adanya perbedaan-perbedaan vertikal, antara lapisan atas dan lapisan bawah yang cukup tajam.

Perbedaan-perbedaan agama, adat istiadat dan kedaerahan sering kali disebut sebagai masyarakat

majemuk, plural societies demikian tentu saja merupakan modal sosial dan sekaligus juga potensial pada terjadinya konflik sosial yang bukan saja dapat mengganggu keserasian sosial tetapi lebih dari itu akan mengakibatkan disintegrasi sosial yang lebih luas.

Menurut Garna, berbicara tentang masyarakat majemuk, paling tidak terkait dengan dua konsep, yaitu: Pertama, keragaman etnik adalah suatu keadaan yang mampu memperlihatkan wujud pembagian kekuasaan di antara kelompok masyarakat yang tergabung atau disatukan, rasa menyatu melalui dasar kesetiaan, pemilihan nilai bersama dan pembagian kekuasaan.

kedua, masyarakat majemuk adalah masyarakat yang terdiri dari berbagai kelompok ras dan etnik yang berbeda di bawah satu sistem pemerintahan dan paksaan. Sementara itu dalam mengkaji masyarakat majemuk Usman Pelly, mengusulkan dua konsep yang penting untuk diperhatikan:

1. Konsep wadah pembauran (melting pot). Pada dasarnya konsep ini mempunyai asumsi bahwa suatu waktu integrasi itu akan terjadi dengan sendiri.
2. Konsep pluralisme kebudayaan. Konsep ini mempunyai dasar pemikiran bahwa kelompok-kelompok suku bangsa yang berbeda satu sama lain seyogyanya didorong untuk mengembangkan sistem budayanya sendiri dalam kebersamaan, agar dengan demikian dapat memperkaya kehidupan masyarakat majemuk mereka.

Dua konsep di atas menggambarkan bahwa di dalam masyarakat majemuk meniscayakan adanya wadah pembauran dari berbagai etnik yang memiliki latar belakang adat istiadat yang berbeda. Masing-masing etnik didorong untuk mengembangkan sistem budayanya sendiri.

Dalam perspektif sosiologis, perilaku keberagaman memiliki fungsi manifest dan fungsi latent, karenanya satu hal yang harus diperhatikan ketika menganalisis fungsi-fungsi sosial dari tingkah laku keagamaan adalah kehati-hatian dalam membedakan antara yang ingin dicarapai oleh anggota-anggota suatu kelompok pemeluk tertentu dan akibat yang tidak dikehendaki dari tingkah laku mereka dalam kehidupan masyarakat.

Tanpa adanya maksud-maksud yang disadari sangat dimungkinkan tingkah laku keagamaan akan tidak dilaksanakan. Meski demikian, menurut pengamatan para pakar sosiologi, justru akibat-akibat yang tidak disengaja dari tingkah laku keagamaan sering kali lebih penting bagi pemeliharaan masyarakat dari pada tujuan-tujuan mereka yang disadari.

Pemahaman mengenai fungsi agama tidak dapat lepas dari tantangan yang dihadapi manusia dan masyarakatnya (ketidakpastian, ketidakmampuan dan kelangkaan), agama diyakini mampu memberi jawaban yang memuaskan. Masyarakat mempunyai kebutuhan-kebutuhan tertentu untuk kelangsungan hidup dan pemeliharaannya sampai batas-batas minimal, agama berfungsi memenuhi sebagian dari kebutuhan-kebutuhan tersebut. Salah satu kebutuhan

mendasar manusia adalah kenyamanan dan kenyamanan tergantung pada ketertiban masyarakat. Sementara ketertiban masyarakat akan terwujud jika adanya kewajiban-kewajiban yang memiliki sifat memaksa.

Dalam konteks ini, agama menurut pengamatan Nottingham memiliki dua peran penting, pertama, agama telah membantu mendorong terciptanya persetujuan mengenai sifat dan isi kewajiban-kewajiban sosial tersebut dengan memberikan nilai-nilai yang berfungsi menyalurkan sikap para anggota masyarakat dan menetapkan isi kewajiban-kewajiban sosial masyarakat. Dalam peranan ini agama telah membantu menciptakan sistem-sistem nilai sosial yang terpadu dan utuh. Kedua, agama telah memainkan peranan vital dalam memberikan kekuatan memaksa yang mendukung dan memperkuat adat istiadat.

Menurut pengamatan M. Ridwan Lubis, agama memerankan dua fungsi utama Pertama, menjelaskan suatu cakrawala pandang tentang dunia yang tidak terjangkau oleh manusia (beyond) yang dapat melahirkan deprivasi dan frustrasi yang bermakna. Selain itu, agama mengajarkan kesadaran terhadap pandangan dunia (world view) yang pada akhirnya melahirkan etos kerja sebagai pengejawantahan balasan ideal yang akan diterima seseorang ketika berada di alam sesudah kebangkitan.

Kedua, agama sebagai sarana ritual yang memungkinkan hubungan manusia dengan hal yang di luar jangkauannya. Hubungan ini tumbuh dari akumulasi dua sikap yang pada dasarnya saling bertentangan (ketakutan

dan kerinduan) tetapi kemudian larut menjadi satu dalam diri manusia.

Terkait dengan hubungan antar kelompok etnik, Lubis lebih jauh mengatakan bahwa konflik antar suku akan tereliminir manakala anggota suku tersebut terjadi hubungan silang dengan kelompok lain. Oleh karena itu, tidak dapat disangkal bahwa kedekatan agama menjadi salah satu faktor dominan dalam merekat hubungan antar kelompok sosial.

Dengan demikian, dalam perspektif teori struktural fungsional, masyarakat dipahami sebagai sistem sosial yang terdiri atas bagian-bagian atau elemen-elemen yang saling berkaitan dan saling menyatu dalam keseimbangan, perubahan yang terjadi pada satu bagian akan membawa perubahan pula pada bagian yang lain.

Agama merupakan salah satu subsistem sosial yang ada pada masyarakat, tentu dalam konteks ini agama mempunyai peran penting dalam masyarakat. Sebagai satu subsistem sosial, Agama pada kenyataannya hingga saat ini masih eksis dan memiliki peran yang cukup signifikan dalam mendorong terwujudnya keserasian sosial.

D. Agama Sebagai Komoditas

Agama dapat pula dilihat sebagai potensi transformasi, karena berbagai nilai yang diperjuangkan, sekaligus dapat difungsikan untuk menopang terwujudnya aspirasi bernegara. Ia juga merupakan tali pengikat yang dominan dalam interaksi antar manusia, sehingga mampu berperan

menumbuhkan rasa solidaritas kebangsaan. Agama dapat berperan sebagai penyatu dan pengutuh berbagai perbedaan pendapat yang timbul dalam masyarakat. Karena itu, agama juga mampu mengkondisikan dan memberikan kontribusi yang mempertinggi moralitas bangsa dan negara yang menginginkan keadilan, sehingga terciptanya suatu masyarakat adil dan makmur.

Oleh karena itu, umat beragama berkewajiban untuk memberi sumbangan dalam rangka tanggungjawab bersama untuk meletakkan landasan moral, etik dan spiritual serta tetap memperhatikan dan menghormati nilai-nilai tradisional maupun nilai-nilai religious yang menjadi penghayatan bersama dalam memperkokoh pembangunan masyarakat Indonesia.

Tidak dapat dipungkiri bahwa agama juga komoditi politik yang mudah dimobilisasi untuk kepentingan-kepentingan non-agama, atau seolah-olah merupakan kepentingan agama. Fenomena yang banyak terlihat dari Agama Islam sebagai pemeluk mayoritas aktualisasi politik memiliki peranan penting dalam membingkai kohesi nasional. Digunakannya Islam sebagai identifikasi komunitas muslim secara sosiologis, adalah suatu kewajiban. Yang menjadi persoalan, kompetisi untuk menggalang solidaritas kelompok.

Terlebih-lebih lagi penggalangan solidaritas ternyata dilakukan dalam lingkup varian-varian kelompok muslim, bukannya dalam entitas muslim Indonesia secara keseluruhan. Akibatnya, persaingan antar kelompok muslim memperumit peta konflik primordial yang sudah ada.

Masyarakat selalu menyeret primodialisme kearah yang disintegrative. Bagaimana hal ini diupayakan. Kita perlu mengingat bahwa keperluan untuk memobilisasi primodialisme (termasuk agama) adalah karena didorong oleh keperluan untuk melawan atau menguasai negara.

Pada saat Indonesia dalam lilitan krisis di tahun 1950-an mobilisasi primodialisme dan ikatan keagamaan tersebut diperkuat dengan militansi dan kekuatan senjata dan menjadikan perlawanan terhadap negara semakin kentara dalam bentuk yang lebih halus terlihat dalam politik Islam yang ingin menjadikan negara sebagai instrumen pemaksa aktualisasi syariah agenda yang dikedepankan adalah menkonversi Indonesia menjadi Negara Islam.

Potensi agama sebagai bargaining power untuk menyudutkan negara dibentengi dengan legitimasi pertentangan agama dan nasionalisme. Fondasi dari proses delegitimasi ini adalah temuan kesadaran yang diadvokasi intelektual muslim bahwa Islam memiliki watak inklusif, dan fungsi agama yang utama bukanlah untuk pijakan inklusivisme diri.

Membaca trend keberagamaan di Indonesia dewasa ini, terlihat sekali bahwa spirit agama belum menjadi common denominator (kalimatun sawa') dalam merancang etika kebangsaan dan kenegaraan. Yang terjadi agama justru dijadikan komoditas kepentingan (politik, ekonomi, budaya, dan sebagainya), sehingga pesan agama dalam membangun persaudaraan dan perdamaian seringkali tersendat, terlantar, bahkan tergadaikan.

Sejarah mencatat bahwa sidang konstutuan te tahun 1950-an gagal mencapai kesepakatan dikarenakan elite politik menjadikan agama sebagai komoditas kepentingan, sehingga rumusan agenda kebangsaan gagal terwujud. Berbeda dengan yang dilakukan para Wali Songo. Agama ditangan para wali justru tampil sebagai spirit dalam melakukan kerja-kerja kebangsaan.

Spirit agama tampil digarda depan untuk membuka kran-kran penindasan dan penjajahan. Sejarah telah banyak membuktikan dan menjelaskan kepada kita, bahwasanya agama menjadi motor penggerak handal dalam upaya melawan dominasi negara. Kita bisa mengambil cerita bagaimana Kahar Muzakar, Daud Bareureuh, Kartosuwiryo mampu mengemas agama sebagai perekat untuk melawan negara. Kekuatan dalam perlawanan terletak pada dogma-dogma yang tercipta bahwasanya agama lebih utama ketimbang negara.

Bisa juga kita melihat fenomena kerusuhan dimana aparat keamanan-pun tidak serta merta mengayomi namun dilain sisi membantu umat seagamanya. Hal ini karena kekuatan agama mampu masuk hingga sel terkecil dari struktur budaya maupun struktur berpikir manusia Indonesia. Agama memiliki tanda yang dipahami bersama oleh setiap pemeluknya namun demikian mudahnya ketika seseorang memahami kondisi tersebut dan mampu mengambil manfaat atas simbol yang selayaknya sakral.

Terlepas dari suka atau tidak, kepatuhan dan kepatutan kita terhadap ajaran- ajaran agama terkadang membuat

sebagian dari kita lebih memilih untuk bertindak dari sebuah kebiasaan atau tradisi yang berlawanan, maka dengan demikian terbukalah agama yang kemudian dijadikan komoditas untuk pencapaian tujuan. Layar televisi selalu mengiklankan halal dan haram, iklan halal diartukulasikan dengan perempuan berjilbab maupun tampilan dengan atribut agama.

Perbuatan baik hanya dengan simbol orang-orang kalah namun dibalik semua itu ada peluang hegemoni untuk mengajak pada pemirsa maupun masyarakat luas bahwasanya halal yang kami tawarkan adalah kesesuaian dengan citra yang ada dalam kepala tiap manusia. Padahal kita ditarik pada masifikasi yang sebenarnya hanya berbalut simbol-simbol agama. Muslimah yang ditampilkan dengan produk apapun selalu dianggap baik karena pencitraan dengan simbol-simbol agama jauh lebih mumpuni untuk menarik peminat ketimbang menjelaskan fungsi dan dampak dari produk tersebut.

DINAMIKA ALIRAN KEAGAMAAN

Nurlaila, M.Ag & Hardiansyah, S.Th.I., M.Hum

A. Pendahuluan

Dalam studi Islam dengan pendekatan sosiologis, berkembang beragam pendapat tentang latar belakang muncul dan berkembangnya aliran-aliran keagamaan, di antaranya adalah sebagai berikut:

1. Sejumlah ulama melihat bahwa muncul dan berkembangnya aliran keagamaan disebabkan oleh ketidaktahuan para penganutnya terhadap ajaran Islam dan berbagai aspeknya.

2. Menurut Azyumardi Azra, muncul dan berkembangnya beragam aliran atau paham keagamaan yang menyimpang dari paham keagamaan dan mainstream yang berlaku dipercepat oleh kenyataan yang berlangsungnya perubahan-perubahan sosial-ekonomi yang begitu cepat -dengan sedikit latak, bisa juga disebabkan oleh globalisasi-- yang menimbulkan disrupsi disorientasi, atau dislokasi psikologis dalam kalangan tertentu masyarakat. Selain itu, kemunculan mereka juga bisa di dorong oleh ketidakpuasan terhadap paham, gerakan atau organisasi keagamaan

mapan, yang mereka pandang tidak mampu lagi mengakomodasi pengembaraan keagamaan mereka. Pendapat Azra ini relevan dengan pendapat Kuntowidjoyo yang melihat bahwa penyebab munculnya gerakan keagamaan sempalan adalah polarisasi sosial yang semakin menajam.

3. Terdapat indikasi kuat telah terjadi fragmentasi otoritas atas interpretasi teks kitab suci (al-Quran) yang berimplikasi pada pergeseran otoritas keagamaan. Pergeseran posisi sentral ulama dalam masalah-masalah agama yang merupakan fenomena alamiah seiring telah terjadinya ortodoksi Islam dari Mekkah-Arab Saudi ke belahan dunia lain, seperti Mesir. Pergeseran ortodoksi dan kecenderungan fragmentasi ini terus berlangsung di Indonesia hingga sekarang.

Selain faktor yang melatarbelakangi munculnya suatu aliran agama, motif dan tipikal aliran keagamaan dibedakan atas: Pertama, pandangan tentang kemurnian agama (purifikasi) yang tidak hanya terbatas pada praktek keberagaman, melainkan juga pemurnian atas sumber agama itu sendiri, yakni penolakan atas sumber selain alQur'an. kedua, dorongan untuk mendobrak kemapanan paham keagamaan mainstream, khususnya yang berkaitan dengan kebebasan bagi setiap individu muslim untuk menjadi pemimpin bagi dirinya sendiri dalam memahami ajaran Islam tidak terikat pada struktur taklid dalam bentuk apapun. ketiga, pandangan tentang sistem kemasyarakatan yang diidealisasikan, seperti sistem kepemimpinan tunggal di bawah seorang amir atau sistem ummah wâhidah; keempat, sikap terhadap pengaruh

ideologi yang berasal dari Barat dan pengaruh modernisasi, dengan menempatkan Islam sebagai ideologi yang unggul atas ideologi apapun.

Adapun tipologi aliran keagamaan atau gerakan keagamaan oleh para sosiologi diklasifikasi menjadi tiga, yaitu , yaitu endogenous religious movement, exogenous religious movement menunjuk pada usaha-usaha mengubah karakteristik internal agama, dengan berusaha menghidupkan organisasi-organisasi keagamaan. Tipe kedua ini sangat mementingkan aspek survivalitas, kehidupan ekonomi, status, dan ideologi, agar organisasi agama dapat dijamin tetap bertahan dalam keseimbangan atau harmonis dengan lingkungannya. Generative religious movement, adalah gerakan keagamaan yang berusaha mengubah satu atau beberapa aspek ajaran agama, hingga terbentuknya satu agama baru.

B. Aliran Keagamaan: Sebuah Gejala Fragmentasi Otoritas Keagamaan

Dalam studi Islam, dikenal aksioma bahwa agama Islam dan al-Quran adalah interpretable. Meskipun demikian, ulama sepakat bahwa tidak semua orang memiliki otoritas menafsirkan al-Quran atau mengemukakan pemikiran dan pendapatnya tentang Islam dan al-Quran, kecuali orang-orang yang memenuhi syarat dan kualifikasi keilmuan tertentu. Seiring perkembangan zaman, otoritas tersebut telah terfragmentasi dengan munculnya sikap segelintir orang yang berprinsip bahwa interpretasi Islam tidak boleh menjadi

monopoli kalangan tertentu; siapa saja berhak menafsirkan al-Quran serta mengemukakan dan atau menyebarkan pemikirannya tentang Islam tanpa terbelenggu oleh struktur keilmuan yang kompleks. Fragmentasi otoritas merupakan suatu kenyataan yang tidak terhindarkan.

Hal ini antara lain disebabkan oleh karena pemikiran seseorang dipengaruhi oleh tingkat kecerdasannya, disiplin ilmu yang ditekuninya, pengalaman-pengalaman, temuan ilmiah yang berkembang di masanya, kondisi sosial ekonomi dan politik di zaman dia hadir, mazhab fiqhi serta kecenderungan teologi yang dianutnya, dan sebagainya. Sebagai konsekuensi dari fragmentasi otoritas ini adalah munculnya mufassir-mufassir baru yang dalam banyak hal penafsiran yang dikemukakannya berbeda dengan mufassir pendahulunya ataupun dengan generasi yang datang sesudahnya. Fragmentasi otoritas ini bukan terbatas hanya pada tafsir al-Quran, melainkan juga melebar kepada aspek ajaran agama yang lain, termasuk di dalamnya Hadis. Hal initerlihat pada munculnya sejumlah mazhab fiqhi, aliran teologi, dan lain- lain.

Dalam konteks Islam Indonesia, dinamika otoritas keagamaan juga terjadi yang terlihat pada fenomena pergeseran posisi sentral ulama dalam masalah-masalah agama. Hal ini tampak bahwa pada awal abad kedupuluh telah terjadi pergeseran ortodoksi Islam dan kiblat keilmuan dari Makkah ke Mesir, terlihat dalam fakta antara lain munculnya sejumlah permintaan fatwa dari kalangan muslim Melayu kepada Muhammad „Abduh dan Rashid Ridha, lebih

khususnya pada ulama yang disebut terakhir, melalui jurnal al-Manar. Permintaan fatwa ini tidak hanya menandai satu pergeseran referensi paham keagamaan, di mana sebelumnya permintaan fatwa ditujukan kepada ulama Mekah. Fenomena pergeseran ortodoksi dan kecenderungan pragmentasi otoritas ini terus meluas ke dunia Islam hingga ke Indonesia. Hal ini tampak pada abad ke-19 di mana otoritas kyai dengan kitab kuningnya sebagai sumber utama referensi keagamaan telah bergeser oleh terbitnya sejumlah jurnal ilmiah, surat kabar, dan buku-buku keislaman.

Pergeseran tersebut terus berlangsung hingga sekarang, terlihat dengan semakin menjamurnya buku-buku karya intelektual dan terbentuknya komunitas pemikir yang menonjolkan terminologi khas mereka, dan munculnya sejumlah individu yang mengklaim diri sebagai pemegang otoritas Islam, hingga munculnya “tokoh agama” yang justru tidak berlatar belakang pendidikan agama. Bahkan dewasa seiring perkembangan pesat sistem teknologi komunikasi dan informasi ini jenis referensi keagamaan pun semakin bertambah. Sejumlah orang mulai memanfaatkan media-media online (dunia maya) sebagai sumber referensi keagamaan.

C. Aliran Keagamaan: Sebagai Akibat Rendahnya Pengetahuan Agama

Pengamatan pada berbagai komunitas aliran keagamaan, tampak bahwa rendahnya klalifikasi pendidikan penganutnya tidak paralel dengan semangat memahami dan mengamalkan ajaran Islam dengan baik menjadi satu

penyebab ketertarikan pada kelompok-kelompok sempalan. Kenyataan rendahnya tingkat pendidikan ini sebagai salah satu penyebab munculnya aliran-aliran keagamaan sebagaimana dikemukakan di atas relevan dengan pernyataan van Bruinessen yang menyebut kondisi ini sebagai salah watak khas setiap aliran keagamaan. Ia menulis bahwa salah satu gejala yang menonjol dalam beberapa gerakan pendidikan dan pengetahuan agama yang relatif sedikit, tetapi diimbangi dengan semangat keagamaan yang tinggi.

Sebagian besar pengikut aliran keagamaan belum memahami betul aspek dan dimensi agama. Hal ini bisa diamati berbagai dimensi agama, ada ketidakparalelan antara dimensi pengetahuan agama dan dimensi pengamalan. Dimensi pengetahuan dan keyakinan jelas berkaitan satu sama lain karena pengetahuan mengenai satu keyakinan adalah syarat bagi penerimaannya. Walaupun demikian, keyakinan tidak perlu diikuti oleh syarat pengetahuan, juga semua pengetahuan agama tidak selalu bersandar pada keyakinan kuat tanpa benar-benar memahami agamanya, atau kepercayaan bisa kuat atas dasar pengetahuan yang amat sedikit.

Penurunan kredibilitas tokoh agama dimata masyarakat tersebut lebih didasarkan pada persepsi dan pengamatan masyarakat terhadap perilaku keseharian para tokoh yang selalu dikaitkan dengan kesesuaian antara pengetahuan dan wawasan keagamaannya dengan perbuatan dan kehidupan keseharian mereka. Kenyataan ini tergambar pada pernyataan yang bernada kecewa terhadap tokoh

agama dan lembaga keagamaan dari salah seorang anggota masyarakat yang menyatakan bahwa kondisi tokoh agama sekarang jauh berbeda dengan zaman dahulu, sekarang tidak ada lagi pengaruh tokoh agama dalam masyarakat. Dulu, setiap perkataan ulama selalu didengar dan dituruti, karena masyarakat melihat dengan mata kepala bahwa apa yang mereka katakan seperti itu juga yang mereka laksanakan, hidupnya bersahaja.

Dulu orang lebih hormat kepada ulama daripada pemerintah, tapi dewasa ini ulama banyak yang hanya mengikuti kemauan pemerintah, menyampaikan dakwah sesuai kepentingan organisasinya, kehidupannya juga cenderung materialistis, bahkan ada sejumlah parewa syara' yang justru tidak memahami seluk beluk agama yang menjadi tugasnya.

Kenyataan di masyarakat menunjukkan bahwa kredibilitas dan ketokohan ulama sudah bergeser. Pergeseran ketokohan tersebut dalam banyak kasus disebabkan oleh penurunan kualitas kesalihannya, komitmen pada prinsip-prinsip dasar agama, dan pola hidup bersahaja. Selain itu, keberpihakan yang berlebihan terhadap organisasi kemasyarakatan atau partai politik yang diikutinya turut memberi andil.

Dampak dari pergeseran persepsi masyarakat terhadap tokoh ulama tersebut adalah menurunnya legitimasi otoritasnya dan melemahnya kemampuan mempengaruhi umat. Indikasi yang paling nyata adalah ketidakmampuan membimbing masyarakat yang sudah dipengaruhi oleh

berbagai aliran keagamaan sempalan untuk kembali ke jalan yang benar.

D. Munculnya Aliran Keagamaan Sebagai Dampak Kollapsnya Lembaga Keagamaan Tradisional

Masih rendahnya tingkat pemahaman agama masyarakat muslim Indonesia, khususnya yang telah menjadi pengikut aliran keagamaan sempalan, juga dipengaruhi oleh masih rendahnya peran lembaga agama. Peran lembaga keagamaan yang dikenal sebagai entitas yang memwadahi aktivitas keagamaan sekaligus diharapkan menyelesaikan beragam problematika sekaligus diharapkan menyelesaikan beragam problematika sosial keagamaan.

Masyarakat kurang merasakan manfaat secara maksimal yang nyata dari lembaga agama dan organisasi keagamaan karena dianggap belum mampu memenuhi kebutuhan praktis masyarakat. Peran lembaga keagamaan dalam kaitannya dengan penanganan aliran-aliran yang jumlahnya semakin bertambah dan pengikutnya sebagai berikut:

1. Kementerian Agama

Eksistensi, tugas, fungsi dan perannya dipahami sebatas fungsi administratif, yang hanya menangani urusan haji, madrasah, NTCR, zakat, dan pengaturan pelaksanaan peringatan hari-hari besar Islam secara formal di tingkat pemerintah kota. Tugas penerangan dan pembinaan kehidupan beragama tidak dirasakan nyata, meskipun pada

saat yang sama diakui bahwa awal muncul dan berkembangnya aliran-aliran keagamaan sempalan Kementerian Agama cukup responsif tapi kemudian perannya tidak dirasakan sama sekali. Peran Kementerian Agama, khususnya tenaga penyuluh agama sebenarnya juga sangat diharapkan pada pembinaan pengikut aliran-aliran keagamaan sempalan yang telah keluar dari kelompok tersebut, namun tidak pernah dilakukan.

2. Majelis Ulama Indonesia (MUI)

Lembaga ini dianggap cukup responsif dan lebih aspiratif dalam memenuhi aspirasi umat serta lebih concern terhadap dinamika permasalahan sosial agama, termasuk sikapnya terhadap aliran-aliran keagamaan yang menyimpang. Hanya saja, seruan dan keputusan MUI tidak memiliki legitimasi yang kuat, karena hanya sebatas menyampaikan fatwa, nasehat, dan pendapat, tidak memiliki kewenangan melarang kegiatan sekelompok orang atau organisasi.

3. Organisasi sosial keagamaan

Organisasi-organisasi sosial keagamaan, seperti Nahdlatul Ulama (NU), Muhammadiyah, Darud Dakwah wal Irsyad (DDI) telah dikenal luas oleh masyarakat Indonesia. Hanya saja masyarakat lebih merasakan fungsi sosialnya dibandingkan perannya pada penanganan yang terkait masalah-masalah keberagaman. Bahkan ada segelintir warga masyarakat yang menilai organisasi sosial agama lebih berpotensi sebagai disintegrator umat. Penilaian yang bernada minor tersebut didasarkan pada:

a). Pengamatan terbatas sebahagian masyarakat pada aktivitas pembinaan keagamaan yang dilaksanakannya terbatas pada anggota atau warganya saja, enggan melibatkan tokoh agama yang berasal dari luar komunitasnya. Akibatnya, masyarakat yang tidak terinventarisir sebagai anggota dari organisasi sosial keagamaan tersebut praktis kirang tersentuh oleh kegiatan mereka; atau

b). Sikap segelintir warga organisasi sosial keagamaan tertentu yang lebih fanatik terhadap organisasi keagamaan dibandingkan fanatismenya terhadap agama Islam itu sendiri.

E. Peran Lembaga Keagamaan Dalam Menangani Perkembangan Aliran Keagamaan

Perkembangan berbagai aliran keagamaan sempalan dengan segala dinamikanya harus diakui sebagai satu kenyataan sejarah. Bahkan Nabi Muhammad saw. pun dalam salah satu hadisnya sudah memprediksi akan lahirnya sejumlah aliran keagamaan dalam Islam yang jumlahnya melebihi jumlah aliran keagamaan pada dua agama samawi pendahulunya. Dari deskripsi empat faktor sosiologis yang menyebabkan tumbuh dan berkembangnya aliran-aliran keagamaan sebagaimana terdahulu, maka dapat dipastikan bahwa selama:

- 1) Tingkat pengetahuan agama masyarakat muslim masih rendah.
- 2) Pragmentasi otoritas keagamaan terus berlangsung tanpa kendali.

3) Lembaga keagamaan tradisional tidak berperan sebagaimana harapan ideal masyarakat.

4) kecenderungan praktis-pragmatisme masih ada dalam tubuh umat Islam, maka selama itu pula potensi muncul dan berkembangnya aliran-aliran keagamaan tetap ada.

Selama keempat faktor di atas masih ada, maka juga akan berimplikasi pada: pertama, ada aliran keagamaan yang bertahan dengan baik di wilayah tertentu, ada juga yang muncul kemudian menghilang begitu saja; kedua, ada aliran keagamaan yang berpotensi membentuk agama baru. Dalam proses ini akan selalu ada truth claim dan dominasi kebenaran dan aliran keagamaan yang telah mapan, pada saat yang sama aliran keagamaan baru akan terus berjuang melakukan pergulatan posisional dan harus ikut serta mendefinisikan kebenaran, sehingga terjadi, meminjam istilah Geertz struggle for the real.

Meskipun demikian, penanganan terhadap gejala muncul dan berkembangnya aliran-aliran keagamaan tidak perlu membuat umat Islam bersikap reaktif-emosional, akan tetapi sebaiknya mengembangkan pendekatan filosofis dan argumentasi yang rasional guna meyakinkan para penganut aliran-aliran keagamaan dengan menunjukkan kekeliruan yang terdapat pada ajarannya.

Oleh karena itu, mengantisipasi berkembangnya aliran-aliran keagamaan perlu dilakukan upaya-upaya dalam dua tataran sekaligus, yaitu tataran akademik dan tataran

praktis. Pada tataran teoritis-akademik, sejumlah upaya telah dilakukan ulama dalam rangka mengatasi berkembangnya aliran-aliran keagamaan.

Upaya-upaya tersebut umumnya bersifat pembelaan terhadap ajaran Islam yang mainstream, dengan menegaskan kesesuaian antara ajaran pokok sebagaimana dalam al-Qur'an serta hadishadis Nabi, memperkuat dengan argumentasi naqliyah dan aqliyah, sekaligus menunjukkan kelemahan argumentasi yang terdapat pada sejumlah aliran-aliran keagamaan. Pada tataran praktis, upaya untuk membendung penyebaran aliran-aliran keagamaan sempalan adalah dengan memahami dengan baik realitas masyarakat di mana ajaran tersebut berkembang.

Oleh karena itulah maka diperlukan peningkatan pengetahuan masyarakat muslim tentang aspek-aspek ajaran Islam. Gambaran terdahulu menunjukkan rendahnya tingkat pengetahuan agama dan kecenderungan praktispragmatisme dalam menjalankan ajaran agama turut memberi kontribusi peningkatan jumlah penganut/pengikut aliran/gerakan keagamaan.

Menyadari rendahnya tingkat pendidikan seiring munculnya kesadaran akan pentingnya peningkatan pengetahuan di bidang agama dan kecenderungan aktualisasi nilai-nilai agama dalam kehidupan sehari-hari, dalam beberapa tahun terakhir, seiring kebijakan pembangunan di bidang peningkatan kualitas kehidupan keagamaan, muncul fenomena sosial keagamaan dalam bentuk lain.

Di tengah masyarakat muncul inisiatif membantuk pengajian secara mandiri dan membentuk majelis-majelis taklim. Pada komunitas masyarakat kelas menengah sudah biasa diselenggarakan diskusi- diskusi, khususnya pada momen-momen peringatan hari-hari besar Islam. Melalui kegiatankegiatan keagamaan seperti itulah harapan warga masyarakat muslim Indonesia akan terjadinya perubahan positif dalam kehidupan beragama di masa depan.

Pada aspek lain, diperlukan upaya pemberdayaan lembaga-lembaga keagamaan, dan peningkatan sikap proaktif pengurus lembaga keagamaan tersebut terhadap permasalahan keberagaman umat Islam. Pemberdayaan tersebut merupakan keniscayaan, karena dewasa ini semakin kuatnya proses sekularisasi yang berdampak pada mundurnya pengaruh agama dalam kehidupan.

Dalam penanganan aliran-aliran keagamaan sempalan inilah Peran lembaga keagamaan, khususnya Perguruan-perguruan Tinggi Islam memegang posisi yang strategis dan menentukan. Hal ini disebabkan tidak saja karena aspek sumber daya manusianya tetapi juga karena Perguruan Tinggi Islam mengemban misi pengabdian masyarakat. Demikian pula jumlah alumni Perguruan Tinggi Islam yang hingga pada hari ini telah tersebar ke berbagai pelosok nusantara, beberapa orang di antaranya menempati posisi strategis dalam pemerintahan.

Penyebaran alumni Perguruan Tinggi Islam dengan sendirinya akan menjawab keterbelakangan pengetahuan agama masyarakat akan adanya individu-individu yang

memiliki dasar-dasar pengetahuan agama yang baik yang diharapkan dapat meredam semakin meluasnya pragmentasi otoritas keagamaan.

Dengan pemberdayaan lembaga keagamaan dan menumbuhkan sikap proaktif bagi pengurus lembaga keagamaan terhadap permasalahan keberagaman umat Islam diharapkan gejala kemunduran peran agama seperti yang digambarkan di atas dapat di atasi. Dengan peningkatan peran agama itu pula tingkat pemahaman keagamaan masyarakat muslim dapat ditingkatkan sehingga kecenderungan berkembangnya sejumlah aliran keagamaan sempalan bisa diantisipasi lebih dini.

AGAMA DAN ORGANISASI KEAGAMAAN

Khairil Anwar, S.Ag

A. Pendahuluan

Indonesia merupakan negara berbasis masyarakat majemuk yang antara lain ditandai oleh beragam suku, ras, dan juga agama. Keragaman ini menjadi unik oleh karena di dalam perbedaan-perbedaannya juga ada kemampuan menjalin komitmen serta kesadaran hidup bersama. Dengan demikian, keragaman bukan dilihat sebagai perbedaan (secara spasial), melainkan sebagai kekayaan secara kultural.

Kesadaran masyarakat atas kemajemukan inilah yang dalam kehidupan masyarakat biasa dikenal dengan masyarakat berkesadaran plural. Satu ciri utama masyarakat berkesadaran plural adalah pengakuan atas keberbedaan, dan keberbedaan itu sesungguhnya *sunatullah* (kehendak Tuhan), merupakan sesuatu yang nyata dan tidak bisa dipungkiri. Sebaliknya, penolakan terhadap pluralisme justru akan menimbulkan ketegangan dan bahkan konflik, karena meniadakan sesuatu yang nyata juga merupakan pengingkaran terhadap *sunatullah* tersebut.

Dalam sebuah agama memiliki organisasi keagamaan

sebagai lembaga atau wadah tempat perkumpulan para tokoh agama ataupun pakar yang mengerti tentang agama itu sendiri. Organisasi keagamaan adalah organisasi yang bermula dari pengalaman keagamaan yang dialami oleh pendiri organisasi dan para pengikutnya. Dengan kata lain, organisasi keagamaan adalah organisasi yang memiliki nilai dasar perjuangan berlandaskan pada dogma atau ajaran suatu agama di dalam memperjuangkan terwujudnya tujuan organisasi yang tentunya organisasi keagamaan memiliki budaya organisasi yang juga berlandaskan pada ajaran agama. Dari pengalaman demikian lahir suatu bentuk perkumpulan keagamaan yang kemudian menjadi organisasi keagamaan yang sangat terlembaga.

Di samping itu, terbentuknya berbagai organisasi ini memberikan akses terhadap kesadaran untuk memperjuangkan nasib sendiri melalui instrumen organisasi yang bersifat nasional. Misalnya organisasi keagamaan Islam yang merupakan kelompok organisasi yang terbesar jumlahnya, baik yang memiliki skala nasional maupun yang bersifat lokal, tidak kurang dari 40 buah organisasi keagamaan Islam yang berskala nasional memiliki cabang-cabang organisasinya di ibukota propinsi maupun ibukota kabupaten/kotamadya, seperti : Nahdlatul Ulama (NU), Sarikat Islam (SI), Persatuan Tarbiyah Islamiyah (PERTI), Majelis Ulama Indonesia (MUI), Gabungan Usaha Perbaikan Pendidikan Islam (GUPPI), Majelis DaKwah Islamiyah (MDI), Dewan Mesjid Indonesia (DMI), Ikatan Cendekiawan Muslim se Indonesia (ICMI), Himpunan Mahasiswa Islam (HMI), Persatuan Mahasiswa Islam Indonesia (PMII), Aisyiah, Muslimat NU, dan

sebagainya. Sedangkan organisasi keagamaan Islam yang bersifat lokal pada umumnya bergerak di bidang daKwah dan pendidikan seperti: Majelis TaKlim, Yayasan Pendidikan Islam, Yayasan Yatim Piatu, Lembaga-Lembaga DaKwah Lokal, dan sebagainya.

B. Pengertian Agama

Agama merupakan suatu ciri kehidupan sosial manusia yang universal, dalam arti bahwa semua masyarakat mempunyai cara-cara berpikir dan pola-pola perilaku yang memenuhi syarat untuk disebut agama (*religious*).

Ensiklopedi Islam Indonesia menyebutkan, bahwa agama berasal dari kata Sansekerta, yang pada mulanya masuk ke Indonesia sebagai nama kitab suci golongan Hindu Syiwa (kitab suci mereka bernama „Agama). Kata itu kemudian menjadi dikenal luas dalam masyarakat Indonesia, akan tetapi dalam penggunaannya sekarang, ia tidak mengacu kepada kitab suci tersebut tetapi dipahami sebagai nama jenis bagi keyakinan hidup tertentu yang dianut oleh masyarakat, sebagaimana kata *dharm*a (juga berasal dari bahasa Sansekerta).

Lepas dari masalah pendapat mana yang benar, masyarakat beragama pada umumnya memang memandang agama itu sebagai jalan hidup yang dipegang dan diwarisi turun-temurun oleh masyarakat, agar hidup mereka menjadi tertib, damai dan tidak kacau.

C. Pengertian Organisasi Keagamaan

Organisasi keagamaan adalah perkumpulan sosial yang dibentuk oleh masyarakat, baik yang berbadan hukum maupun yang tidak berbadan hukum, yang berfungsi sebagai sarana partisipasi masyarakat dalam lingkup suatu agama tertentu. Sebagai makhluk yang selalu hidup bersama-sama, manusia membentuk organisasi sosial untuk mencapai tujuan-tujuan tertentu yang tidak dapat mereka capai sendiri. Konsep organisasi keagamaan yang dipakai adalah adalah suatu pendekatan, kegiatan, atau sistem kehidupan yang irrasional.

Organisasi keagamaan yang khusus mengurus upacara dan hubungan dengan tuhan yang dinamakan tarekat (jalan menuju kebenaran). Kelompok masyarakat yang religius atau agama secara teologis yang telah menjadi antropologis itu, mengembangkan segenap sistem budayanya dari ajaran ajaran tuhan atau wahyunya yang diungkap dalam kitab suci. Roland Robertson, membuat suatu model yang menggambarkan hubungan antara tingkat homogenitas dan heteroginitas agama yang dianut suatu masyarakat dikaitkan dengan organisasi keagamaan, ke dalam beberapa tipe:

- 1) Pada masyarakat yang memiliki heteroginitas dalam agama, yaitu agama secara organisasi terpisah dari kehidupan ekonomi, politik, dan pendidikan; dan agama yang tidak begitu terorganisir.
- 2) Pada masyarakat yang memiliki homogenitas agama, yaitu agama terorganisir dengan baik, dan agama

diakui secara resmi sebagai agama Negara dan tidak terorganisir seperti pada masyarakat primitif.

D. Pola Keagamaan

Berdasarkan cara beragamanya, pola keagamaan masyarakat memiliki suatu perbedaan. Elizabeth K. Nottingham mengemukakan tiga model masyarakat. Masyarakat pertama, adalah tipe masyarakat yang di dalamnya nilai-nilai agama sangat berpengaruh. Model kedua, merupakan kombinasi antara nilai religius dan sekuler. Sementara model ketiga, adalah tipe masyarakat yang didominasi oleh nilai-nilai sekuler. Ketiga model tersebut tidak menggambarkan tahapan perkembangan sejarahnya, meskipun banyak masyarakat telah atau sedang menjalani tahapan-tahapan yang seperti itu.

Model *pertama*, menggambarkan masyarakat kecil terpencil dan terbelakang. Tingkat perkembangan teknologinya rendah, hanya sedikit terdapat pembagian kerja dan pembagian kelas sosialnya sederhana. Keluarga merupakan lembaga terpenting. Spesialisasi organisasi pemerintahan dan kehidupan ekonomi sederhana, laju perubahan sosial lamban. Sistem intelektual kepercayaan dan mitos agak kompak dan relatif homogen, demikian pula agamanya. Orang-orang belum menggambarkan objek yang dipujanya sebagai sesuatu yang berbeda dengan dirinya.

Simbol agama yang sangat potensial adalah gambaran mitos nenek moyang dan pahlawan-pahlawan yang disimbolkan dalam berbagai bentuk. Individu dan

masyarakatnya dianggap lahir dari Tuhan alam. Sistem perilaku religiusnya biasanya langsung merupakan identifikasi antar kelompok pemuja dengan yang dipujanya, seperti tampak dalam pesta totem, dimana binatang totem dipotong, dimakan sebagai partisipasi mistik dan perilaku keagamaan. Organisasi keagamaan tidak terpisah dari keseluruhan kegiatan masyarakat lainnya, terjalin dalam aktivitas ekonomi, politik, keluarga, rekreasi dan sebagainya.

Agama dan magic penting dan berpengaruh dalam kehidupan masyarakat, terutama dalam menghadapi stress. Karena lembaga lain relatif belum berkembang, kecuali keluarga. Agama menyajikan sarana dalam pengintegrasian dan kesatuan masyarakat secara menyeluruh. Nilai-nilai keagamaan sering meningkatkan konservatisme dan menghambat perubahan. Hal ini merupakan alasan mengapa peranan tradisi sangat penting dalam masyarakat semacam ini.

Selain itu, karena tidak adanya kepentingan yang kontradiktif dan menyatu-padunya agama dalam hampir semua aspek kehidupan sosial, memberi pengaruh kuat untuk menyatukan dan menstabilkan masyarakat. Bagi individu, agama banyak berpengaruh dalam keseluruhan proses sosialisasi. Sosialisasi ditandai oleh upacara-upacara keagamaan dalam peristiwa kelahiran, pubertas, perkawinan dan dalam fase-fase peralihan penting lainnya di dalam siklus kehidupan individu.

Organisasi kepribadian individu erat hubungannya dengan nilai-nilai keagamaan yang langsung diwariskan oleh

keluarga dan masyarakat kepada individu- individu yang sedang berkembang. Karena tidak adanya saingan variasi model kepribadian yang lain, yang berupa model sekuler, maka agama berperan tanpa tandingan sebagai pusat pemersatu dalam pengelolaan kepribadian individu dalam masyarakat tipe ini.

Kedua, merupakan masyarakat praindustri yang sedang berkembang. Masyarakat ini tidak begitu terpencil, perubahan lebih cepat dibanding dengan model pertama, daerahnya lebih luas, penduduknya lebih banyak, tingkat perkembangan teknologi lebih tinggi dibandingkan dengan model pertama, pembagian kerja dan kelas sosial beraneka ragam serta tingkat kemampuan tulis-baca sudah memadai. Pertanian dan industri tangan penting dalam perekonomian desa dengan beberapa pusat perdagangan kota. Lembaga pemerintahan dan kehidupan ekonomi sedang menuju spesialisasi.

Fungsi agama di dalam masyarakat model kedua ini lebih kompleks dibandingkan dengan masyarakat model pertama. Agama masih memberikan makna penting kepada sistem nilai masyarakat, tetapi kadang-kadang mendorong ke arah terjadinya konflik sosial dalam masyarakat. Pada masyarakat ini, meskipun suasana keagamaan dan sekuler terus bertumpang tindih pada aspek-aspek tertentu, tetapi pada sisi lain terus berkembang ke arah berbeda. Dalam masyarakat model kedua ini juga tidak bisa dihindarkan timbulnya perbenturan kepentingan antara organisasi keagamaan dengan organisasi politik. Karen organisasi keagamaan selain memiliki nilai acuan ukhrawi yang sifatnya

transendental juga memiliki orientasi duniawi, termasuk bidang sosial, ekonomi, politik, sehingga memungkinkan terjadinya bentrokan kepentingan dan disintegrasi.

Dan Ketiga, adalah masyarakat industri sekuler. Masyarakat ini sangat dinamik, pengaruh ilmu dan teknologi menembus berbagai bidang kehidupan, termasuk ke dalamnya bidang agama. Meluasnya sekularisasi sering mempersempit ruang gerak lingkungan sakral dan kepercayaan keagamaan. Akibatnya organisasi keagamaan terpecah-pecah dan lepas dari ikatan pemerintahan duniawi. Agama dan negara berjalan berdampingan secara terpisah.

Pertumbuhan sekularisasi sangat melemahkan fungsi agama, baik sebagai pengintegrasi maupun sebagai sumber keresahan. Sebaliknya, tatanan ekonomi dan negara telah mengambil alih fungsi penting yang dulunya diperankan oleh agama, seperti pada masyarakat model pertama dan kedua. Karena adanya sikap ketidakacuhan terhadap sistem nilai sekuler yang semakin berkembang, menimbulkan toleransi terhadap perbedaan agama.

Namun, persamaan akidah dan ibadat di kalangan berbagai organisasi keagamaan, secara internal meningkatkan fungsi agama sebagai unsur pemersatu. Terutama jika kelompok itu merupakan kelompok minoritas. Meskipun pengaruh organisasi keagamaan melemah, namun nilai-nilai keagamaan yang mendasar dan universal tetap bertahan dan memberikan sumbangan terhadap keterpaduan masyarakat. Hal ini tampak pada saat-saat terjadinya ketegangan, dimana himbuan untuk kembali kepada nilai religius tradisional terus

muncul. Misalnya, pada masa perang atau bahaya nasional, bencana alam dan lain sebagainya, pertolongan Tuhan dimohon secara hidmat bersama-sama. Demikian pula pada upacara-upacara penting, misalnya pelantikan presiden, pembukaan sidang juga sering disertai doa dengan harapan karunia Tuhan.

Sementara itu, dari sisi yang berbeda Komaruddin Hidayat membedakan lima sikap keberagamaan, yaitu eksklusifisme, inklusifisme, pluralisme, eklektivisme dan universalisme. Kelima tipologi ini tidak berarti masing-masing lepas dan terputus dari yang lain dan tidak pula permanen, tetapi lebih tepat dikatakan sebagai sebuah kecenderungan menonjol, mengingat setiap agama maupun sikap keberagamaan senantiasa memiliki potensi untuk melahirkan kelima sikap di atas.

Pertama, sikap eksklusifisme akan melahirkan pandangan bahwa ajaran yang paling benar hanyalah agama yang dipeluknya. Agama lain sesat dan wajib dikikis, atau pemeluknya dikonversi karena baik agama maupun pemeluknya terkutuk dalam pandangan Tuhan. Baik karena dorongan psikologis maupun faktor teologis, eksklusifisme beragama selalu ditemukan dalam setiap masyarakat. Sikap eksklusif berarti bahwa seseorang merasa dirinya yang paling baik dan paling benar, sementara yang lainnya tidak masuk hitungan.

Kedua, sikap inklusifisme berpandangan bahwa di luar agama yang dipeluknya juga terdapat kebenaran, meskipun tidak seutuh dan sesempurna agama yang dianutnya.

Dalam paham inklusifisme seseorang masih tetap meyakini bahwa agamanya yang paling baik dan benar. Namun, dalam waktu yang sama mereka memiliki sikap toleran dan bersahabat dengan pemeluk agama lain.

Ketiga, pluralisme, lebih konkret lagi berpandangan bahwa secara teologis pluralitas agama dipandang sebagai suatu realitas niscaya yang masing-masing berdiri sejajar sehingga semangat misionaris atau dakwah dianggap tidak relevan.

Keempat, eklektivisme adalah suatu sikap keberagamaan yang berusaha memilih dan mempertemukan beberapa segi ajaran agama yang dipandang baik dan cocok untuk dirinya, sehingga format akhir dari sebuah agama menjadi semacam mozaik yang bersifat eklektik.

Kelima, universalisme beranggapan bahwa pada dasarnya semua agama adalah satu dan sama. Hanya saja, karena faktor historis- antropologis, agama kemudian tampil dalam format plural.

E. Tipologi Sikap Beragama

Komarudin Hidayat menyebutkan adanya lima tipologi sikap keberagamaan, yakni “eksklusivisme, inklusivisme, pluralisme, eklektivisme, dan universalisme”. Kelima tipologi ini tidak berarti masing-masing lepas dan terputus dari yang lain dan tidak pula permanen, tetapi lebih tepat dikatakan sebagai sebuah kecenderungan menonjol, mengingat setiap agama maupun sikap keberagamaan senantiasa memiliki

potensi untuk melahirkan kelima sikap di atas.

Sekalipun ada perbedaan tipe-tipe teologis beragama dengan para penstudi agama lain, seperti Panikkar, yang menyebutkan tiga tipologi : eksklusif, inklusif, dan paralelisme, tetapi secara esensial penyebutan-penyebutan tipologis itu mengandung pada makna dan pengertian yang sama. Oleh karena itu, kita akan membahas tipologi-tipologi beragama sebagai berikut:

1. Eksklusivisme

Sikap eksklusivisme akan melahirkan pandangan ajaran yang paling benar hanyalah agama yang dipeluknya, sedangkan agama lain sesat dan wajib dikikis, atau pemeluknya dikonversi, sebab agama dan penganutnya terkutuk dalam pandangan Tuhan. Sikap ini merupakan pandangan yang dominan dari zaman ke zaman, dan terus dianut hingga dewasa ini. Tuntutan kebenaran yang dipeluknya mempunyai ikatan langsung dengan tuntutan eksklusivitas. Artinya, kalau suatu pernyataan dinyatakan, maka pernyataan lain yang berlawanan tidak bisa benar.

Menurut Nurcholish Madjid, sikap yang eksklusif ini ketika melihat agama bukan agamanya, agama-agama lain adalah jalan yang salah, yang menyesatkan bagi para pemeluknya. Paradigma ini merupakan pandangan yang dominan dari zaman ke zaman dan terus dianut hingga dewasa ini : "Agama sendirilah yang paling benar, yang lain salah".

Bagi agama Kristen, inti pandangan eksklusivisme adalah bahwa Yesus adalah satu-satunya jalan yang sah untuk keselamatan. “Akulah jalan dan kebenaran dan hidup. Tidak ada seorangpun yang datang kepada Bapa, kalau tidak melalui Aku” (Yohanes 14:6). Juga, dalam ayat lain (Kisah Para Rasul 4,12) disebutkan, “Dan keselamatan tidak ada di dalam siapapun juga selain di dalam Dia, sebab di bawah kolong langit ini tidak ada nama lain yang diberikan kepada manusia yang olehnya kita dapat diselamatkan”.

Menurut Budhy Munawar Rachman, untuk contoh Islam, sekalipun tidak ada semacam kuasa gereja dalam agama Kristen, khususnya Katolik yang bisa memberi fatwa menyeluruh seperti contoh di atas, banyak penafsir sepanjang masa yang menyempitkan Islam pada pandangan-pandangan eksklusif.

2. Inklusivisme

Sikap inklusivisme berpandangan bahwa di luar agama yang dipeluknya juga terdapat kebenaran, meskipun tidak seutuh atau sesempurna agama yang dianutnya. Di sini masih didapatkan toleransi teologis dan iman. Menurut Nurcholish Madjid, sikap inklusif adalah yang memandang bahwa agama-agama lain adalah bentuk implisit agama kita.

Paradigma itu membedakan antara kehadiran penyelamatan (the salvific presence) dan aktifitas Tuhan dalam tradisi-tradisi agama lain, dengan penyelamatan dan aktifitas Tuhan sepenuhnya dalam Yesus Kristus. Menjadi “inklusif” berarti percaya bahwa seluruh kebenaran agama

non-Kristiani mengacu kepada Kristus. Paradigma ini, membaca agama orang lain dengan kaca mata sendiri. Sikap beragama inklusif pun bisa berarti memasukkan orang lain dalam kelompok kita.

Pandangan yang paling ekspresif dari paradigma inklusif ini tampak pada dokumen Konsili Vatikan II, mempengaruhi seluruh komunitas Katolik sejak 1965. Dokumen yang berkaitan dengan pernyataan inklusif berkaitan dengan agama lain, ada pada "Deklarasi tentang Hubungan Gereja dan Agama-agama Non-Kristiani".

Teolog terkemuka yang menganut aliran ini adalah Karl Rahner, yang pandangan-pandangannya termuat dalam karya terbesarnya *The Theological Investigation* yang berjilid 20, dalam "Christianity and the Non-Christian Religions", jilid 5. Problem yang diberikannya adalah, bagaimana terhadap orang-orang yang hidup sebelum karya penyelamatan itu hadir, atau orang-orang sesudahnya tetapi tidak pernah tersentuh oleh Injil? Di sini, Rahner memunculkan istilah inklusif, *the Anonymous Christian* (Kristen anonim), yaitu orang-orang non-Kristen. Menurut pandangannya, Kristen anonim juga akan selamat, sejauh mereka hidup dalam ketulusan hati terhadap Tuhan, karena karya Tuhan pun ada pada mereka, walaupun mereka belum pernah mendengar Kabar Baik.

Dalam contoh Islam juga sering dikemukakan misalnya istilah dari seorang filsuf Muslim abad XIV, Ibn Taymiyah, yang membedakan antara orang-orang dan agama Islam umum (yang non-Muslim *par excellence*), dan orang-orang dan agama

Islam khusus (Muslim par excellence). Kata Islam sendiri di sini diartikan sebagai “sikap pasrah kepada Tuhan”. Mengutip Ibn Taymiyah, “semua nabi dan pengikut mereka seluruhnya disebut oleh Allah adalah orang-orang Muslim”.

Hal itu sebagaimana dalam Alquran (S.3:85), “Barangsiapa yang menganut suatu din selain al-Islam maka tidak akan diterima daripadanya al-din dan di akhirat ia termasuk yang merugi”. Dan firman-Nya, “sesungguhnya al-din di sisi Allah ialah al-Islam” (Q.S.3:19). Dalam tafsiran penganut “Islam Inklusif”, bahwa sekalipun para nabi mengajarkan pandangan hidup yang disebut al-Islam, itu tidaklah berarti bahwa mereka dan kaumnya menyebut secara harfiah agama mereka al-Islam dan mereka sendiri sebagai orang-orang Muslim.

Itu semua hanyalah peristilahan Arab. Para nabi dan rasul, dalam da’wah mereka pada dasarnya menggunakan bahasa kaumnya masing-masing. Alquran (S.14:4) menegaskan, bahwa “Kami tidak mengutus seorang Rasul; kecuali dengan bahasa kaumnya”. Dengan demikian, kalangan Islam inklusif menganut suatu pandangan bahwa agama semua nabi adalah satu.

Sikap inklusivistik akan cenderung untuk menginterpretasikan kembali hal-hal dengan cara sedemikian, sehingga hal-hal itu tidak saja cocok tetapi juga dapat diterima. Sikap demikian akan membawa ke arah universalisme dari ciri eksistensial atau formal daripada isi esensialnya. Suatu kebenaran doktrinal hampir tidak dapat diterima sebagai yang universal jika ia sangat berkeras mempertahankan isinya

yang spesifik, karena pencerapan isi selalu mengandaikan perlunya suatu 'forma mentis' yang khusus. Sikap menerima yang toleran akan adanya tataran-tataran yang berbeda, sebaliknya, akan lebih mudah dicapai. Sementara, suatu pola payung atau struktur formal dapat dengan mudah mencakup sistem-sistem pemikiran yang berbeda.

Tetapi, pada sisi lain, sikap inklusivitas pun membawa beberapa kesulitan. *Pertama*, ia juga menimbulkan bahaya kesombongan, karena hanya andalah yang mempunyai privilese atas penglihatan yang mencakup semua dan sikap toleran; andalah yang menentukan bagi yang lain tempat yang harus mereka ambil dalam alam semesta.

Kedua, jika sikap ini menerima ekspresi 'kebenaran agama' yang beraneka ragam sehingga dapat merengkuh sistem-sistem pemikiran yang paling berlawanan pun, ia terpaksa membuat kebenaran bersipat relatif murni. Kebenaran dalam arti ini tidak mungkin mempunyai isi intelektual yang independen, karena berbeda atau berlainan dengan orang lain.

3. Pluralisme Atau Paralelisme

Dalam pandangan Panikkar dan Budhy Munawar Rachman, masing-masing menyebutkan istilah pluralisme dan paralelisme. Sikap teologis paralelisme adalah bisa terekspresi dalam macam-macam rumusan, misalnya: "agama-agama lain adalah jalan yang sama-sama sah untuk mencapai Kebenaran yang Sama"; agama-agama lain berbicara secara berbeda, tetapi merupakan Kebenaran-kebenaran yang sama sah";

atau “setiap agama mengekspresikan bagian penting sebuah kebenaran”. Paradigma itu percaya bahwa setiap agama mempunyai jalan keselamatan sendiri. Karena itu, klaim kristianitas bahwa ia adalah satu-satunya jalan (eksklusif), atau yang melengkapi atau mengisi jalan yang lain (inklusif), harus ditolak demi alasan-alasan teologis dan fenomenologis.

Menurut Komarudin Hidayat, sikap pluralisme lebih moderat dari sikap inklusivisme, atau bahkan dari eksklusivisme. Ia berpandangan bahwa secara teologis pluralitas agama dipandang sebagai suatu realitas niscaya yang masing-masing berdiri sejajar (paralel) sehingga semangat misionaris atas dakwah dianggap tidak relevan.

Sikap paralelistis memberikan keuntungan yang sangat positif; toleran dan hormat terhadap yang lain serta tidak mengadili mereka. Sikap ini pun menghindari sinkretisme dan eklektisme yang keruh yang membuat suatu agama mengikuti selera pribadi; sikap ini pun menjaga batas-batas tetap jelas dan merintis pembaharuan yang ajeg pada jalan-jalan orang itu sendiri. Namun demikian, sikap paralelisme ini pun tidak lepas dari kesulitan-kesulitan.

Pertama, sikap ini tampaknya berlawanan dengan pengalaman historis bahwa tradisi-tradisi keagamaan dan manusiawi yang berbeda biasanya muncul dari saling campur tangan, pengaruh dan fertilisasi.

Kedua, sikap ini dengan tergesa-gesa menganggap seolah-olah setiap tradisi manusia sudah memuat dalam dirinya sendiri semua unsur untuk pertumbuhan dan perkembangan

lebih lanjut; singkatnya, sikap ini mengandaikan kecukupan diri dari setiap tradisi dan sepertinya menyangkal adanya kebutuhan atau kesenangan untuk saling belajar.

Di lingkungan Islam, tafsir Islam pluralis merupakan pengembangan secara lebih liberal dari Islam inklusif. Misalnya, perbedaan antara Islam dan Kristen (dan antaragama secara umum) diterima sebagai perbedaan dalam meletakkan prioritas antara “perumusan iman” dan “pengalaman iman”. Menurut para penganut Islam pluralis (misalnya Schuon dan Hossein Nasr), setiap agama pada dasarnya distruktur oleh dua hal: “perumusan iman” dan “pengalaman iman”.

Hanya saja, setiap agama selalu menanggapi yang satu mendahului yang kedua. Islam, misalnya, mendahulukan “perumusan iman” (tauhid) dan “pengalaman iman” mengikuti perumusan iman tersebut. Sebaliknya agama Kristen, mendahulukan “pengalaman iman” (dalam hal ini pengalaman akan Tuhan yang menjadi manusia pada diri Yesus Kristus, yang kemudian disimbolkan dalam sakramen misa dan ekaristi), dan “perumusan iman” mengikuti pengalaman ini, dengan rumusan dogmatis mengenai trinitas. Perbedaan dalam struktur perumusan dan pengalaman iman ini hanyalah ekspresi kedua agama ini dalam merumuskan dan mengalami Tuhan yang sama.

Sekalipun demikian, sikap paralelistis, pada sisi yang lain, menjanjikan lebih banyak kemungkinan untuk suatu hipotesis kerja awal. Sikap ini sekaligus membawa amanat akan pengharapan dan kesabaran; pengharapan bahwa kita akan

berjumpa pada akhirnya, dan kesabaran karena sementara ini masih harus menanggung perbedaan-perbedaan kita.

4. Eklektivisme

Eklektivisme adalah suatu sikap keberagamaan yang berusaha memilih dan mempertemukan berbagai segi ajaran agama yang dipandang baik dan cocok untuk dirinya sehingga format akhir dari sebuah agama menjadi semacam mosaik yang bersipat eklektik.

5. Universalisme

Universalisme beranggapan bahwa pada dasarnya semua agama adalah satu dan sama. Hanya saja, karena faktor historis-antropologis, agama lalu tampil dalam format plural. Menurut Raimundo Panikkar, jika suatu perjumpaan agama terjadi, baik dalam fakta yang nyata maupun dalam suatu dialog yang disadari, maka orang membutuhkan metafora dasar untuk mengutarakan masalah-masalah yang berbeda. Oleh karena itu, tiga macam model perjumpaan agama bisa berguna, yakni model fisika : pelangi, model geometri : invarian topologis, dan model antropologis : bahasa.

Paradigma atau sikap beragama yang berkembang di dunia Kristen tersebut, ada hubungannya dengan teori W.C. Smith dalam mengkaji agama orang lain. Ada beberapa tahapan dalam hubungan antar agama yang akhirnya memunculkan dialog harmonis antar umat beragama. Tahapan-tahapan ini dianalogkan dalam bentuk : I, You dan We. "I" menunjukkan eksklusif. "You", menunjukkan inklusif,

dan “we” menunjukkan keterbukaan.

Para penganut agama memberikan tanggapan atau respon terhadap doktrin agamanya. Dalam memberikan respon ini, para penganut agama, paling tidak, memiliki tiga kecenderungan yang bisa diamati. Komarudin Hidayat memberikan ketiga kecenderungan itu, yang menurutnya bukan sebagai suatu pemisahan, yakni kecenderungan “mistikal”(solitary), “profetik-ideologikal” (solidarity), dan “humanis-fungsional”.

Respon keberagamaan mistikal, antara lain, ditandai dengan penekanannya pada penghayatan individual terhadap kehadiran Tuhan. Dalam tradisi mistik, puncak kebahagiaan hidup adalah apabila seseorang telah berhasil menghilangkan segala kotoran hati, pikiran, dan perilaku sehingga antara dia dan Tuhan terjalin hubungan yang intim yang dijalin dengan cinta kasih.

Tipologi kedua adalah profetis ideologikal. Kecenderungan beragama model ini, antara lain, ditandai dengan penekanannya pada misi sosial keagamaan dengan menggalang solidaritas dan kekuatan. Oleh karenanya, kegiatan penyebaran agama dengan tujuan menambah pengikut dinilai memiliki keutamaan teologis dan memperkuat kekuatan ideologis. Yang ketiga, humanis fungsional, adalah kecenderungan beragama dengan titik tekan pada penghayatan nilai-nilai kemanusiaan yang dianjurkan oleh agama.

Pada tipe ini, apa yang disebut kebijakan hidup

beragama adalah bila seseorang telah beriman pada Tuhan dan lalu berbuat baik terhadap sesamanya. Sikap toleran dan eklektisisme pemikiran beragama merupakan salah satu ciri tipe ini.

Kecenderungan keberagamaan di atas hanyalah merupakan respon aksentuasi dan tidak identik dengan totalitas doktrin agama itu sendiri. Partisipasi dan pelaksanaan seseorang ke dalam agama biasanya bersifat parsial, dibatasi oleh kemampuan, pilihan, serta kuat lemahnya komitmen iman seseorang. Namun demikian, dalam konteks hidup bermasyarakat dan bernegara, tipologi keberagamaan ketiga, yang menekankan orientasi kemanusiaan, perlu mendapat apresiasi dan penekanan. Hikmah hidup keberagamaan haruslah bermuara pada komitmen untuk menjunjung tinggi nilai-nilai kemanusiaan tanpa harus dihambat oleh sentimen kelompok keagamaan.

Daftar Pustaka

- Abdul Aziz Ahyadi, *Psikologi Agama (Kepribadian Muslim Pancasila)*, (Bandung: Sinar Baru Algensindo, 2001).
- Abdur Rozaki, *Menabur Kharisma Menuai Kuasa: Kiprah Kiai dan Blater sebagai Rezim Kembar di Madura* (Yogyakarta: Pustaka Marwa, 2004).
- Agus Bustanudin, *Agama Dalam Kehidupan Manusia*. (Jakarta: Rajawali Press, 2006).
- Azyumardi Azra, *Konteks Berteologi di Indonesia: Pengalaman Islam* (Jakarta: Paramadina, 1999).
- Burhanuddin dan Ahmad Baedowi, *Transformasi Otoritas Keagamaan; Pengalaman Islam Indonesia* (Jakarta: Gramedia, 2003).
- Elizabeth k. Notingham, *Agama dan Masyarakat: Suatu Pengantar Sosiologi Agama*, (Jakarta: Rajawali, 1985).
- Jajat Burhanuddin dan Ahmad Baedowi, *Transformasi Otoritas Keagamaan; Pengalaman Islam Indonesia* (Jakarta: Gramedia, 2003).

- Jalaluddin Rakhmat, *Psikologi Agama Sebuah Pengantar*, (Bandung: Mizan Pustaka, 2003).
- Jalaludin, *Psikologi Agama*, (Jakarta: PT. Raja Grafindo Persada, 1998).
- Koentjaraningrat, *Masalah Kesukubangsaan dan Integrasi Nasional* (Jakarta: UI Press, 1993).
- M. Ridwan Lubis, *Agama dalam Perbincangan Sosiologi*, (Bandung: Citapustaka, 2010).
- Maaruf Amin, *Empat Bingkai Kerukunan Nasional* (Banten: Yayasan An-Nawawi, 2013).
- Maaruf Amin, *Harmoni Dalam Keberagaman: Dinamika Relasi Agama-Negara* (Jakarta: Dewan Pertimbangan Presiden Bidang Hubungan Antar Agama, 2011).
- Nasikun, *Sistem Sosial Indonesia*, (Jakarta: Raja Grafindo Persada, 1993).
- Ridwan Lubis, *Agama Dalam Perbincangan Sosiologi* (Bandung: Ciptapustaka Media Perintis, 2010).
- Ronald, *Tokoh Agama Dalam Masyarakat*, (Jakarta : Rineka Cipta, 2004).
- Soerjono Soekanto, *Sosiologi Suatu Pengantar*, (Jakarta: Grafindo Persada, 2003).
- Thomas F. O'Dea, *Sosiologi Agama (Suatu Pengenalan Awal)*, (Jakarta: Raja Grafindo Persada, 2006).